

LKjIP

Laporan kinerja instansi pemerintah

Bapenda Kabupaten pemalang

Tahun 2020

Pemerintah kabupaten pemalang

Jalan surohadikusumo no. 1 pemalang

Telp.0284 321244

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020. LKjIP Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap perangkat daerah. Laporan ini juga memiliki fungsi sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran atas tingkat pencapaian perangkat daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan hingga di masa mendatang.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 baik tenaga dan pikirannya diucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus. Semoga ini dapat memberikan manfaat yang optimal.

Pemalang, 19 Januari 2021

KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG



BEJO SUWARNO, S.IP
Pembina Utama Muda
NIP. 19611125 198607 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2020 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang yang memuat rencana, capaian dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategis, kebijakan, program dan kegiatan seperti yang telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Adapun ringkasan prestasi kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang yang dicapai di tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut :

Sasaran : Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta efisien dalam pemanfaatan APBD, indikator sebagai berikut

- a. Indikator Rasio realisasi PAD terhadap potensi/target PAD

Tahun 2020 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang menargetkan sebesar 7,50%, untuk indikator Rasio realisasi PAD terhadap potensi/target PAD adapun realisasinya adalah sebesar 12,31%, berdasarkan hal tersebut maka capaian indikator Rasio realisasi PAD terhadap potensi/target PAD untuk tahun 2020 adalah sebesar 164,13%, maka mendapat predikatnya **SANGAT BAIK**.

- b. Indikator Peningkatan/Pertumbuhan PAD

Tahun 2020 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang menargetkan sebesar 6,17%, untuk indikator Peningkatan/Pertumbuhan PAD adapun realisasinya adalah sebesar -7,00%, berdasarkan hal tersebut maka capaian indikator Peningkatan/Pertumbuhan PAD untuk tahun 2020 adalah sebesar -125% , maka mendapat predikat **SANGAT RENDAH..**

Indikator Program terdiri dari 3 Bidang pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang sebagai berikut :

a. Indikator Rasio pajak daerah terhadap PAD.

Tahun 2020 Bidang Perencanaan Pendapatan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang menargetkan sebesar 17,50%, untuk indikator Rasio pajak daerah terhadap PAD adapun realisasinya adalah sebesar 25,87%, berdasarkan hal tersebut maka capaian indikator Rasio pajak daerah terhadap PAD untuk tahun 2020 adalah sebesar 147,83%, maka mendapat predikat **SANGAT BAIK**.

b. Indikator Persentase wajib pajak tertagih/persentase data pajak daerah yang ditetapkan (PBB) sebesar 70%, telah terealisasi 68,33%.

Tahun 2020 Bidang Pendataan dan Penetapan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang menargetkan sebesar 70%, untuk indikator Persentase wajib pajak tertagih/persentase data pajak daerah yang ditetapkan (PBB) adapun realisasinya adalah sebesar 68,33%, berdasarkan hal tersebut maka capaian indikator Persentase wajib pajak tertagih/persentase data pajak daerah yang ditetapkan (PBB) untuk tahun 2020 adalah sebesar 97,61%, maka mendapat predikat **SANGAT BAIK**.

c. Indikator Persentase pajak daerah terhadap target

Tahun 2020 Bidang Penagihan dan Keberatan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang menargetkan sebesar 100%, untuk indikator Persentase pajak daerah terhadap target adapun realisasinya adalah sebesar 112,66%, berdasarkan hal tersebut maka capaian indikator Persentase pajak daerah terhadap target untuk tahun 2020 adalah sebesar 112,66%, maka mendapat predikat **SANGAT BAIK**.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang untuk tahun –tahun selanjutnya . Hal tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

1. Memperbanyak tempat-tempat pelayanan pajak untuk mempermudah pelayanan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah;

2. Pembinaan dan sosialisasi peraturan pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat dan petugas pemungut pajak daerah dan retribusi daerah baik di desa/kelurahan maupun di kecamatan dan OPD pemungut retribusi;
3. Launcing aplikasi SPOP online dalam upaya mempermudah pelayanan masyarakat dalam pengelolaan pemungutan pajak PBB-P2;
4. Pengembangan aplikasi SIMPATDA;
5. Optimalisasi pengawasan obyek pajak dan retribusi dengan selalu melakukan monitoring dan evaluasi;
6. Pemutahiran data wajib pajak dan data obyek pajak secara bertahap, semua jenis pajak ;
7. Penataan dan penegakan regulasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bekerjasama dengan Kejaksaan dan Satpol PP.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini penting untuk dipergunakan sebagai pijakan bagi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

Pemalang, 19 Januari 2021

KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG



BEJO SUWARNO, S.IP
Pembina Utama Muda
NIP. 19611125 198607 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii-iv
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi-viii
Daftar Grafik	ix
Daftar Lampiran	x
BAB. I. PENDAHULUAN.....	1
A. Gambaran Umum Organisasi	2
1. Struktur Organisasi	2
2. Tugas Pokok dan Fungsi.....	4
B. Isu Strategis	6
C. Keuangan	7.
BAB. II. PERENCANAAN KINERJA	13
A. Perencanaan Strategis	13
1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	13
2. Strategis dan Arah Kebijakan	14
B. Perjanjian Kinerja	15
C. Rencana Anggaran	16
BAB. III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	21
A. Capaian Kinerja Organisasi	22
B. Akutabilitas Anggaran	48
1. Realisasi Anggaran	48
2. Analisis Efisiensi Sumber Daya	49
C. Inovasi	56
BAB. IV. Penutup	61

DAFTAR TABEL

BAB I	Perihal	Halaman
Tabel.1.1.	Kondisi Kepegawaian Bapenda Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Berdasarkan Tingkat Golongan	4
Tabel.1.2.	Kondisi Kepegawaian Bapenda Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Berdasarkan Tingkat Pendidikan	5
Tabel.1.3.	Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Bapenda Kabupaten Pemalang Tahun 2020	5
Tabel.1.4.	Anggaran Bapenda Kabupaten Pemalang Tahun 2020	6
Tabel.1.5.	Target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020	8
Tabel.1.6.	Program dan Kegiatan APBD Tahun 2020	9
BAB. II		
Tabel.2.1	Tujuan, Sasaran dan Indikator Bapenda Kabupaten Pemalang Tahun 2020	13
Tabel.2.2	Sasaran, Program dan Indikator Bapenda Kabupaten Pemalang Tahun 2020	14
Tabel.2.3	Strategi, Arah Kebijakan Bapenda Kabupaten Pemalang Tahun 2020	14
Tabel.2.4.	Perjanjian Kinerja Utama Bapenda Kabupaten Pemalang Tahun 2020	15
Tabel.2.5.	Sasaran dan Indikator Kinerja Program Bapenda Kabupaten Pemalang Tahun 2020	16
Tabel.2.6.	Program dan Kegiatan APBD Tahun 2020	16
Tabel.2.7.	Anggaran Belanja Langsung Per Sasaran Strategi Bapenda Tahun 2020	19
BAB. III		
Tabel.3.1	Skala Nilai Pengukuran Kinerja Ordinal	21
Tabel.3.2	Capaian Indikator Kinerja Atas Perjanjian Bapenda Kabupaten Pemalang Tahun 2020	22

Tabel.3.3	Capaian Indikator Kinerja Program Bapenda tahun 2020.....	22
Tabel.3.4	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Bapenda Kabupaten Pemalang Tahun 2020	23
Tabel.3.5	Pengukuran Capaian Indikator Pogram Bapenda Kabupaten Pemalang Tahun 2020	25
Tabel.3.6	Capaian Kinerja Indikator 1 Perbandingan Tahun 2017 s/d Tahun 2020	27
Tabel.3.7	Capaian Realisasi PAD yang Dikelola Bapenda Kabupaten Pemalang tahun 2020	28
Tabel.3.8	Capaian Kinerja Indikator 2 Perbandingan Tahun 2017 s/d Tahun 2020	29
Tabel.3.9	Capaian Kinerja Program Indikator 1 Perbandingan Tahun 2017 s/d Tahun 2020	32
Tabel.3.10	Capaian Kinerja Program Indikator 2 Perbandingan Tahun 2017 s/d Tahun 2020	35
Tabel.3.11	Capaian Kinerja Program Indikator 3 Perbandingan Tahun 2017 s/d Tahun 2020	37
Tabel.3.12	Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2020	39
Tabel.3.13	Target dan Realisasi Penerimaan PAD Lain-Lain PAD (Sewa Tanah Eks Bondo Desa	40
Tabel.3.14	Anggaran Belanja Langsung Per Sasaran Strategis Bapenda Kabupaten Pemalang Tahun 2020	45
Tabel.3.15	Target dan Realisasi Anggaran Per Sasaran Strategis Bapenda Tahun 2020	48
Tabel.3.16	Target , Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Terhadap Capaian Sasaran Strategis Bapenda tahun 2020.....	49
Tabel.3.17	Penyerapan Anggaran Per Program dan Kegiatan Tahun 2020	50
Tabel.3.18	Penyerapan Per Program Per Bidang/Sekretaris Tahun 2020	53

Tabel.3.19	Realisasi Belanja Bapenda Kabupaten Pemalang Tahun 2020	54
Tabel.3.20	Jumlah Belanja Operasi Bapenda Kabupaten Pemalang Tahun 2020	54
Tabel.3.21	Jumlah Belanja Modal Bapenda Kabupaten Pemalang Tahun 2020	55
Tabel.3.22	Realisasi Penggunaan Energi Listrik Bapenda Kabupaten Pemalang Tahun 2020	55
Tabel.3.23	Realisasi Penggunaan Energi Air (PDAM) Bapenda Kabupaten Pemalang tahun 2020	56

DAFTAR GRAFIK

BAB. III	Perihal	Halaman
Grafik. 3.1	Rasio PAD terhadap potensi/target PAD Tahun 2020	28
Grafik.3.2	Peningkatan/Pertumbuhan PAD Tahun 2020.....	30
Grafik.3.3	Rasio Pajak Daerah Terhadap PAD Tahun 2020	33
Grafik.3.4	Persentase Wajib Pajak Tertagih /Data Pajak Daerah Yang Ditetapkan	35
Grafik.3.5	Persentase Pejak Daerah Terhadap Target	38
Grafik. 3.6	Realisasi Pajak Daerah Tahun 2020	41
Cragik.3.7	Realisasi Pajak Daerah dan Lain-Lain PAD
	Bapenda Kabupaten Pematang Hari Tahun 2020	42

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Perihal
1	Indikator Kinerja Utama Bapenda Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021
2	Penyajian Kinerja Bapenda Kabupaten Pemalang Tahun 2020.
3	Rencana Kinerja Tahunan Bapenda Kabupaten Pemalang Tahun 2020.
4.	Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020

BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2020 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2018 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good governance). Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2020 diharapkan dapat bermanfaat untuk :

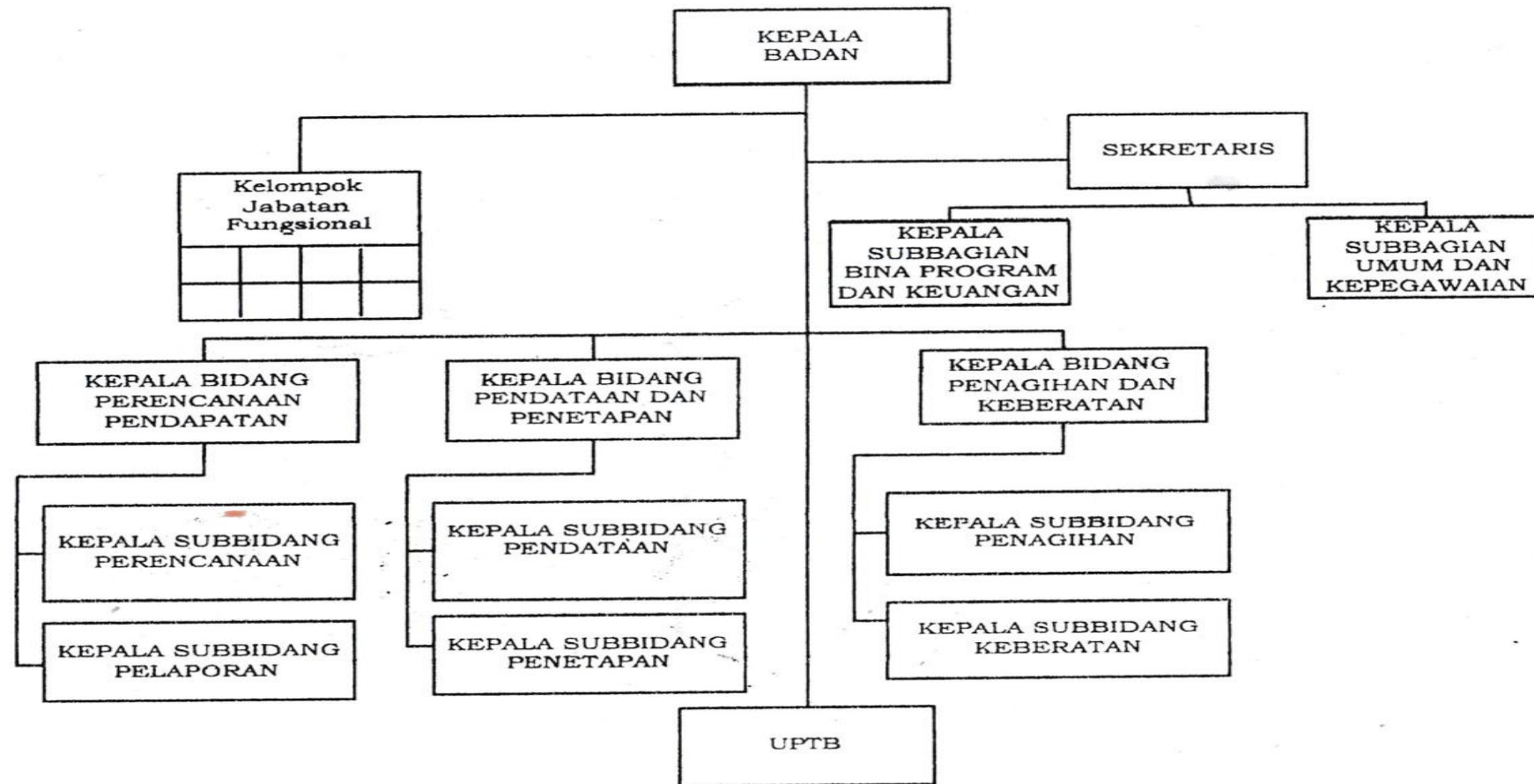
1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi manfaat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pematang Jaya.
2. Mendorong Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pematang Jaya didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pematang Jaya untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pematang Jaya dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1 Struktur Organisasi

Badan Pengelolaan Pendapatan BupatiKabupaten Pematang terbetuk berdasarkn Peraturan Daerah Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pematang . Berdasarkan peraturan daerah tersebut Susunan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pematangadalah sebagai berikut : :

- a. Kepala Badan ;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Bina Program dan Keuangan.
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Perencanaan Pendapatan, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Perencanaan.
 - 2) Sub Bidang Pelaporan
- d. Bidang Pendataan dan Penetapan, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pendataan.
 - 2) Sub Bidang Penetapan
- e. Bidang Penagihan & Keberatan, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Penagihan.
 - 2) Sub Bidang Keberatan.
- f. UPTB;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.



Struktur Organisasi Bapenda Kabupaten Pemalang

2 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang, bahwa Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan pendapatan daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Menyusun kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung kelancaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang hingga akhir Desember 2020 memiliki pegawai sebanyak 56orang yang terdiri dari laki-laki 45 orang, perempuan 11 orang, dengan komposisi sebagai berikut :

Tabel : 1.1
Kondisi Kepegawaian Bapenda Kabupaten Pemalang Tahun 2020
Berdasarkan Tingkat Golongan

No	Uraian	Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	Jumlah
1.	Kepala Badan	-	-	-	1	1
2.	Sekretariat	1	4	6	1	12
3.	Bidang Perencanaan Pendapatan		1	6	1	8
4.	Bidang Pendataan dan Penetapan	-	3	6	0	9
5.	Bidang Penagihan dan Keberatan	-	9	17	0	26
	Jumlah	1	18	38	5	56

Sumber : Bapenda Tahun 2020

Tabel : 1.2

Kondisi Kepegawaian Bapenda Kabupaten Pemalang Tahun 2020
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Uraian	SLTP	SLTA	D.3	S-1	S-2	Jml
1.	Kepala Badan	-	-	-	1	-	1
2.	Sekretariat	1	4	-	7	-	12
3.	Bidang Perencanaan Pendapatan	-	1	-	6	1	8
4.	Bidang Pendataan dan Penetapan	-	4	-	5	-	9
5.	Bidang Penagihan dan Keberatan	10	8	1	7	-	26
	Jumlah	11	18	1	28	1	56

Sumber : Bapenda Tahun 2020

Tabel. 1.3

Rekapitulasi Sarana dan Prasarana
Bapenda Kabupaten Pemalang Tahun 2020

No.	Jenis	Jumlah	Anggaran (Rp)
1	Tanah	1	1.575.000.000,00
2	Peralatan dan mesin	521	5.476.953.368,00
3	Gedung dan bangunan	3	1.166.104.000,00
4	Jalan, irigasi dan jaringan	3	74.168.100,00
5	Aset tetap lainnya	5	1.734.500,00
	Jumlah		8.293.959.968,00

Sumber : SIM Barang Milik Daerah (BMD) Tahun 2020

Pada tahun 2020 rekapitulasi sarana dan prasarana di Bapenda Kabupaten Pemalang total mencapai (jenis/buah) dengan nilai sebesar Rp.8.293.959.968,00 (Delapan milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah), sarana prasarana tersebut terdiri dari KIB A, KIB B, KIB C, KIB D dan KIB E , untuk diketahui bahwa KIB. A adalah tentang tanah, KIB B tentang peralatan dan mesin, KIB C tentang gedung dan bangunan, KIB D tentang jalan, irigasi dan jembatan dan KIB E tentang aset tetap lainnya. Sarana dan prasanana tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Bapenda Kabupaten Pemalang.

Anggaran belanja langsung yang dikelola oleh Bapenda Kabupaten Pemalang di bidang-bidang dan sekretariat dengan rincian sebagai berikut :

Tabel.1.4.

Anggaran Belanja Bapenda Kabupaten Pemalang Tahun 2020

No	Bidang/Sekretariat	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Sekretariat	4	28	1.195.019.960,00
2	Bidang Perencanaan Pendapatan	1	10	1.383.706.000,00
3	Bidang Penagihan dan Keberatan	1	5	348.585.000,00
4	Bidang Pendataan dan Penetapan	1	6	517.904.040,00
	Total	8	49	3.445.215.000,00

Sumber: Bapenda Tahun 2020

B. ISU STRATEGIS

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu strategis dapat diidentifikasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah menetapkan jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang bisa dipungut oleh pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah tidak bisa menetapkan pemungutan pajak dan retribusi selain yang sudah ditetapkan. Kondisi tersebut menjadikan Bapenda Kabupaten Pemalang harus lebih kreatif dalam mengoptimalkan upaya intensifikasi dalam menggali potensi dari masing-masing jenis pajak dan retribusi yang jenisnya sudah ditetapkan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bapenda Kabupaten Pemalang sebagai koordinator untuk merumuskan kebijakan dalam hal pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, namun kewenangannya dalam melaksanakan **Pajak Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (Sewa Tanah Eks Bando Desa)**. Isu strategis dapat diidentifikasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang karena belum optimalnya sumber sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk meningkatkan realisasi penerimaan PAD ada permasalahan yang harus dioptimalkan pengelolaannya antara lain :

- 1) Belum optimalnya data atau laporan untuk menunjang kinerja pemerintah;
- 2) Beberapa regulasi yang terkait dengan pengelolaan pendapatan perlu dilakukan reviu seiring dengan perkembangan kelembagaan serta terbitnya produk hukum tingkat atasnya, selain itu belum cukup tersedianya produk hukum yang berkaitan dengan strategi

optimalisasi pendapatan daerah, dan Standar Operasional Prosedur mengenai pelayanan pajak daerah yang dapat dijadikan acuan kerjasehingga memudahkan untuk melakukan upaya peningkatankinerja dan mengevaluasi kinerja;

- 3) Belum memadainya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia khususnya dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah, karena institusi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan baru terbentuk pada awal tahun 2017, dimana didalamnya banyak pegawai yang baru masuk, sehingga belum menguasai permasalahan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM ini juga disebabkan terbitnya berbagai regulasi baru tentang pendapatan daerah sehingga persepsi yang belum merata dari setiap pegawai tentang regulasitersebut;
- 4) Kurangnya pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah, terutama dalam memperhitungkan membayar dan melaporkan pajak/retribusi daerah dengan benar, termasuk dalam melakukan porporasi karcis/bill/nota penjualan serta melaporkan secara teratur bonggol karcis/bill/nota penjualan dan sisa karcis/bill/nota pejualan yang tidak laku setiap bulannya, termasuk dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah.
- 5) Kurangnya sosialisasi dan informasi tentang pembayaran pajak daerah sehingga masih banyak masyarakat yang belum paham akan kemudahan dalam membayar pajak daerah;
- 6) Belum validnya data wajib pajak, karena masih memakai data dari KPP Pratama pelimpahan PBB-P2 tahun 2013 dan dalam hal terjadi jual beli tanah dan bangunan tidak dibarengi secara langsung proses balik nama dari pihak penjual ke pihak pembeli sehingga sering kesulitan melacak pemilik yang baru yang mengakibatkan timbulnya piutang pajak;
- 7) Belum optimalnya Pengelola Sistem Informasi daerah.

C. KEUANGAN

Berdasarkan Undang-Undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Bapenda sebagai Koordinator pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2020 target PAD penetapan sebesar Rp.309.060.518.000 dengan adanya wabah pandemi covid 19 target setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 292.672.718.000,00 mengalami pengurangan target sebesar Rp.16.387.800.000,00 (5,30 %) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel.1.5

Target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020

No	Uraian	Target Semula (Rp)	Target Perubahan (Rp)	Berkurang/ Bertambah (Rp)	(%)
1	Pendapatan Pajak Daerah	79.300.000.000,00	71.521.800.000,00	7.778.200.000,00	9,80 %
2.	Retribusi Daerah	35.015.000.000,00	31.095.585.000,00	3.919.415.000,00	11,19 %
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	23.680.518.000,00	21.366.882.000,00	2.313.636.000,00	9,77 %
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	171.056.000.000,00	168.688.451.000,00	2.376.549.000,00	1,39 %
	JUMLAH	309.060.518.000,00	292.672.718.000,00	16.387.800.000,00	5,30 %

Sumber : SIMDA Tahun 2020

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang pada tahun 2020 berasal dari APBD Kabupaten Pemalang Tahun 2020

Pada Tahun Anggaran 2020 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang mendapatkan alokasi belanja sebesar Rp.15.307.893.000 dengan adanya wabah covid 19 mengalami rasionalisasi anggaran berkurang menjadi Rp. 10.431.039.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

- **Belanja Tidak Langsung**

Keseluruhan belanja tidak langsung teralokasi pada belanja gaji pegawai yang bersifat tetap sebesar Rp. 6.985.824.000,00

- **Belanja Langsung**

Belanja langsung sebesar Rp.3.445.215.000,00 yang diperuntukan baik untuk mendukung pelaksanaan program /kegiatan utama yang berkaitan langsung dengan sasaran strategis maupun program/kegiatan pendukung.

Belanja langsung yang berasal dari APBD sebesar Rp. 3.445.215.000,00 yang didukung oleh 5 program dan 49 kegiatan dalam tabel dibawah ini :

Tabel : 1.6
Program dan Kegiatan APBD Tahun 2020
Bapenda Kabupaten Pemalang

NO	KODE REKENING PROGRAM/KEGIATAN	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	ANGGARAN	KET
	4.04.4.04.07.01.	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			3.445.215.000	-
I	4.04.4.04.07.01.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		12 bulan	801.887.960	-
1	4.04.4.04.07.01.1.1	Penyediaan Jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dikelola	7000 surat	15.000.000	
2	4.04.4.04.07.01.1.2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	12 bln	125.418.000	
3	4.04.4.04.07.01.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional	Jumlah kendaraan dinas yang berijin	60 unit	18.974.000	
4	4.04.4.04.07.01.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah laporan bulanan administrasi keuangan yang dilaksanakan	12 bln	13.510.000	
5	4.04.4.04.07.01.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang tersedia	12 bln	25.000.000	
6	4.04.4.04.07.01.1.9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor	Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja yang tersedia	12 bln	7.500.000	
7	4.04.4.04.07.01.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang dibeli	1 paket	40.000.000	
8	4.04.4.04.07.01.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang yang dicetak dan digandakan	1 paket	20.000.000	
9	4.04.4.04.07.01.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang dibeli	1 paket	25.000.000	
10	4.04.4.04.07.01.1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	10 buah	29.500.000	
11	4.04.4.04.07.01.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan – undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang dibeli	1 paket	14.100.000	
12	4.04.4.04.07.01.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang dibeli	4 jenis	80.000.000	
13	4.04.4.04.07.01.1.18	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan keluar daerah	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan keluar daerah yang diikuti	12 bln	164.535.960	
14	4.04.4.04.07.01.1.19	Penyediaan Jasa Keamanan	Jumlah jasa keamanan kantor yang tersedia	12 bln	12.000.000	
15	4.04.4.04.07.01.1.25	Penyediaan jasa administrasi keuangan pengelolaan pendapatan	Jumlah kegiatan peningkatan pendapatan pajak daerah yang dilaksanakan	12 bln	211.350.000	
II	4.04.4.04.07.01.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		12 bulan	515.037.500	
16	4.04.4.04.07.01.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	2unit	25.000.000	

NO	KODE REKENING PROGRAM/KEGIATAN	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	ANGGARAN	KET
			yang dibeli			
17	4.04.4.04.07.01.2.11	Pengadaan komputer dan perlengkapannya	Jumlah pengadaan komputer dan perlengkapannya yang dibeli	2 unit	6.000.000	
18	4.04.4.04.07.01.2.22	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 unit	67.999.500	
19	4.04.4.04.07.01.2.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	1 unit	25.000.000	
20	4.04.4.04.07.01.2.24	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara	58 unit	75.000.000	
21	4.04.4.04.07.01.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	12 bln	15.000.000	
22	4.04.4.04.07.01.2.30	Pemeliharaan rutin / berkala komputer dan perlengkapannya	Jumlah komputer dan perlengkapannya yang dipelihara	12 bln	85.000.000	
23	4.04.4.04.07.01.2.45	Pemeliharaan rutin/berkala software dan sistem informasi	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala software dan sistem informasi yang dilaksanakan	12 bln	216.038.000	
III	4.04.4.04.07.01.6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		12 bulan	25.060.000	
24	4.04.4.04.07.01.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD (TAPKIN)	Jumlah laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD (TAPKIN) yang tersusun	4 dokumen	13.920.000	
25	4.04.4.04.07.01.6.4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah pelaporan keuangan akhir tahun yang tersusun	15 buku	11.140.000	
IV	4.04.4.04.07.01.9	Program Peningkatan dan Perencanaan Penganggaran SKPD		12 bulan	59.340.000	
26	4.04.4.04.07.01.9.1	Penyusunan data base perencanaan SKPD	Jumlah data base yang tersusun	2 dokumen	5.600.000	
27	4.04.4.04.07.01.9.2	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD yang tersusun	6 dokumen	53.740.000	
V	4.04.4.04.07.01.15	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		7,50%, 6,17%	2.043.889.540	
28	4.04.4.04.07.01.15.4	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	Jumlah sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang tersusun	1 dokumen	12.266.000	
29	4.04.4.04.07.01.15.5	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi	Jumlah rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi yang tersusun	1 dokumen	43.650.000	
30	4.04.4.04.07.01.15.13	Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan daerah	Jumlah Sistem Informasi Pengelolaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang tersusun	2 sistem	65.352.000	

NO	KODE REKUNING PROGRAM/KEGIATAN	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	ANGGARAN	KET
31	4.04.4.04.07.01.15.19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Jumlah pengawasan dan kepatuhan membayar pajak daerah yang dilaksanakan	12 bln	65.245.000	
32	4.04.4.04.07.01.15.29	Monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengelolaan pendapatan daerah	Jumlah kegiatan monev pendapatan daerah , pengembangan sistem reward stakeholder PAD dan peningkatan kualitas pengelolaan pajak yang dilaksanakan	4 kegiatan	412.800.000	
33	4.04.4.04.07.01.15.33	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah pengelolaan eks bondo desa yang desanya berubah status menjadi kelurahan	Jumlah sewa tanah ex bondo desa yang desanya berubah status menjadi kelurahan yang terlaksana	318 ha	38.300.000	
34	4.04.4.04.07.01.15.36	Peningkatan efektifitas pengelola keuangan daerah	Jumlah sinergitas pengelolaan pendapatan antar OPD dan seluruh stakeholder yang dilaksanakan	2 kegiatan	312.343.500	
35	4.04.4.04.07.01.15.37	Penyusunan pelaporan semesteran aset/barang PD	Jumlah laporan semesteran aset/barang PD yang tersusun	10 buku	2.932.500	
36	4.04.4.04.07.01.15.38	Penyusunan perhitungan potensi pajak dan target pendapatan	Jumlah perhitungan potensi pajak dan target pendapatan yang tersusun	2 dokumen	139.450.000	
37	4.04.4.04.07.01.15.39	Penyusunan laporan pendapatan daerah	Jumlah laporan pendapatan daerah dan perhitungan UP retribusi bagi SKPD pengelola pendapatan yang tersusun	4 kali	11.561.500	
38	4.04.4.04.07.01.15.40	Penyusunan pemutakhiran data pajak daerah	Jumlah kegiatan pemutakhiran data pajak daerah yang dilaksanakan	1 kegiatan	10.765.040	
39	4.04.4.04.07.01.15.41	Pendataan wajib pajak	Jumlah pendataan wajib pajak daerah yang dilaksanakan	12 kali	92.400.000	
40	4.04.4.04.07.01.15.42	Penyusunan rekonsiliasi data pelaksanaan pendapatan daerah	Jumlah rekonsiliasi data pelaksanaan pendapatan daerah yang dilaksanakan	12 kali	7.739.000	
41	4.04.4.04.07.01.15.43	Penelitian/pemeriksaan Obyek Pajak dan Wajib Pajak	Jumlah Penelitian/pemeriksaan Obyek Pajak dan Wajib Pajak yang dilaksanakan	12 kali	35.000.000	
42	4.04.4.04.07.01.15.44	Penilaian, penetapan dan pencetakan Surat Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Surat Ketetapan Pajak Daerah yang diterbitkan	671.700 SPPT	319.550.000	
43	4.04.4.04.07.01.15.45	Penerbitan dan pendistribusian Surat etetapan Pajak Daerah (SKPD/SPPT/DHKP)	Jumlah Surat ketetapan Pajak Daerah (SKPD/SPPT/DHKP) yang ditribusikan	671.700 SPPT	52.450.000	
44	4.04.4.04.07.01.15.46	Penyusunan daftar tunggakan pajak	Jumlah daftar tunggakan pajak yang tersusun	12 dokumen	8.920.000	
45	4.04.4.04.07.01.15.47	Penerbitan dan penyampaian surat tagihan dan surat teguran	Jumlah Penerbitan dan penyampaian surat tagihan dan surat teguran yang	12 bulan	233.390.000	

NO	KODE REKENING PROGRAM/KEGIATAN	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	ANGGARAN	KET
			dilaksanakan			
46	4.04.4.04.07.01.15.49	Penyelesaian pengaduan dan pelayanan pengajuan keberatan	Penyelesaian pengaduan dan pelayanan pengajuan keberatan	12 bulan	32.670.000	
47	4.04.4.04.07.01.15.51	Penyelesaian pengaduan dan pelayanan permohonan pengurangan ketetapan pajak/pembetulan /pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar	Jumlah pengaduan dan pelayanan permohonan pengurangan ketetapan pajak/pembetulan /pembatalan ketetapan pajak yang terselesaikan	12 bulan	35.305.000	
48	4.04.4.04.07.01.15.52	Pengadaan Papan Hibauan Informasi Pajak Daerah	Jumlah Papan Hibauan Informasi Pajak Daerah kepada publik yang tersedia	244 buah	105.000.000	
49	4.04.4.04.07.01.15.53	Legalisasi karcis/ benda berharga	Jumlah kegiatan porporasi karcis/ benda berharga yang diselesaikan	12 kegiatan	6.800.000	

Sumber : DPA Tahun 2020

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS ORGANISASI

Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang merupakan manifestasi komitmen Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang dalam mendukung Visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 maka tahun 2020 merupakan tahun keempat dalam pelaksanaan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang.

1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Mendasari visi, misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2016-2021, memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Bapenda Kabupaten Pemalang, hal ini ditunjukkan melalui pernyataan misi ke-6 yaitu : ***“Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan supremasi hukum serta kemudahan investasi dan daya saing daerah”***. Yang selanjutnya dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel : 2.1

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Bapenda Kabupaten Pemalang Tahun 2020

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Target
1.	Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta efisien dalam pemanfaatan APBD	Rasio peningkatan PAD	Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta efisien dalam pemanfaatan APBD	1	Rasio realisasi PAD terhadap pendapatan	7,50 %
				2	Prosentase pertumbuhan PAD	6,17 %

Dari tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan , selanjutnya dijabarkan dalam strategis atau cara mencapai tujuan dan sasaran. Strategi terdiri dari kebijakan-kebijakan dan program-program. Sasaran yang dirumuskan dalam program dan indikator adalah sebagai berikut :

Tabel.2.2
Sasaran , Program dan indikator Bapenda Kabupaten Pemalang Tahun 2020

No	Sasaran	Program		Indikator	Target	Keterangan
1	Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta efisien dalam pemanfaatan APBD	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	1	Rasio pajak daerah terhadap PAD	17,5 %	Bidang Perencanaan Pendapatan
			2	Persentase wajib pajak tertagih /persentase data pajak yang ditetapkan (PBB)	70%	Bidang Pendataan dan Penetapan
			3	Rasio pajak daerah terhadap target	100 %	Bidang Penagihan dan keberatan

2 Strategis dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai . cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi.

Tabel : 2.3
Strategi dan Arah Kebijakan Bapenda Kabupaten Pemalang

Visi	Terwujudnya Pemalang Hebat yang Berdaulat, Berjatidiri, Mandiri dan Sejahtera					
Misi	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan supremasi hukum serta kemudahan imnvestasi dan daya saing daerah					
Tujuan		Sasaran		Strategi		Kebijakan
Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta efisien dalam pemanfaatan APBD	1	Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta efisien dalam pemanfaatan APBD	1	Meningkatkan pemahaman tentang tugas dan fungsi Pendelegasian tugas dan wewenang pada masing-masing Bidang tugas;	1	Pelaksanaan Intensifikasi dalam pemungutan Pajak Daerah dan retribusi daerah berdasarkan potensi yang ada
			2	Melakukan	2	Optimalisasi pemanfaatan asset

				koordinasi yang intensif dengan instansi terkait		berupa tanah dan sawah eks bondo desa yang berubah statusnya mejadi kelurahan, agar dapat memberikan kontribusi secara signifikan dalam peningkatan pendapatan daerah
			3	Menyusun sirdur yg efektif, efesien & mudah dipahami & diterapkan	3	Pengembangan basis datadanpotensipajakdaerah agar valid dan up to date

B. PERJANJIAN KINERJA

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima amanah dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran .

Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja 2020 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pematang Jaya disusun berdasar pada RPJMD Tahun 2016-2026, Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021, RKT, IKU dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2020. Adapun Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pematang Jaya adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.4
Perjanjian Kinerja Bapenda Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2020

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran (RP)
1.	Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta efisien dalam pemanfaatan APBD	1	Rasio Realisasi PAD terhadap potensi/target PAD	%	7,50	2.250.195.040,00
		2	Peningkatan/Per tumbuhan PAD	%	6,17	

Sumber : Perjanjian Kinerja Bapenda Tahun 2020

Tabel 2.5

Sasaran dan Indikator Kinerja Program Bapenda Kabupaten Pemalang Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Program	Target 2020		Keterangan
			Satuan	Target	
1	Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta efisien dalam pemanfaatan APBD	1 Rasio Pajak daerah terhadap PAD	%	17,5	Bidang Perencanaan Pendapatan
		2 Persentase WP tertagih/ data pajak daerah yang ditetapkan (PBB)	%	70	Bidang Pendataan dan Penetapan
		3 Persentase pajak daerah terhadap target	%	100	Biadang Penagihan dan Keberatan

Sumber : Renstra Tahun 2016-2021

C. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2020

Bapenda Kabupaten Pemalang pada tahun 2020 telah melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 15.307.893.000,00 dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp.10.714.273.000,00 dan Belanja Langsung Rp.4.593.620.000,00. Melalui mekanisme perubahan APBD Tahun 2020 dengan adanya wabah Covid 19 menjadi Rp.10.431.039.000,00 pengurangan sebesar Rp.4.876.854.000,00 dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp.6.985.824.000,00 dan Belanja Langsung Rp.3.445.215.000,00.

Adapun belanja langsung Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang melalui APBD Tahun Anggaran 2020 untuk melaksanakan program dan kegiatan semula sebesar Rp.4.500.000.000,00 setelah APBD perubahan 2020 menjadi sebesar Rp.3.445.215.000,00 , pengurangan 25 % sebagai berikut :

Tabel : 2.6

Program dan Kegiatan APBD Tahun 2020 Bapenda Kabupaten Pemalang

NO	KODE REKENING PROGRAM/KEGIATAN	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG (%)
	4.04.4.04.07.01.	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		4.500.000.000	3.445.215.000	(25,00)
I	4.04.4.04.07.01.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 bulan	817.934.000	801.887.960	(1,96)

1	4.04.4.04.07.01.1.1	Penyediaan Jasa surat menyurat	7000 surat	15.000.000	15.000.000	0,00
2	4.04.4.04.07.01.1.2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 bln, 4 jenis	140.000.000	125.418.000	(10,42)
3	4.04.4.04.07.01.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional	60 unit	18.974.000	18.974.000	0,00
4	4.04.4.04.07.01.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	12 kali	13.510.000	13.510.000	0,00
5	4.04.4.04.07.01.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	12 kali, 1 orang	20.000.000	25.000.000	25,00
6	4.04.4.04.07.01.1.9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor	3 jenis	7.500.000	7.500.000	0,00
7	4.04.4.04.07.01.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	1 paket	40.000.000	40.000.000	0,00
8	4.04.4.04.07.01.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1 paket	20.000.000	20.000.000	0,00
9	4.04.4.04.07.01.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	1 paket	25.000.000	25.000.000	0,00
10	4.04.4.04.07.01.1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	5 jenis	4.500.000	29.500.000	555,56
11	4.04.4.04.07.01.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan – undangan	2 jenis	14.100.000	14.100.000	0,00
12	4.04.4.04.07.01.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	12bulan	80.000.000	80.000.000	0,00
13	4.04.4.04.07.01.1.18	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan keluar daerah	5 kegiatan	190.000.000	164.535.960	(13,40)
14	4.04.4.04.07.01.1.19	Penyediaan Jasa Keamanan	12 kali, 1 orang	12.000.000	12.000.000	0,00
15	4.04.4.04.07.01.1.25	Penyediaan jasa administrasi keuangan pengelolaan pendapatan	12 kali	217.350.000	211.350.000	(2,76)
II	4.04.4.04.07.01.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	12 bulan	175.725.000	515.037.500	193,09
16	4.04.4.04.07.01.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	2unit	25.000.000	25.000.000	0,00
17	4.04.4.04.07.01.2.11	Pengadaan komputer dan perlengkapannya	19 unit	0	6.000.000	100,00
19	4.04.4.04.07.01.2.22	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	2 unit	20.000.000	67.999.500	240,00
20	4.04.4.04.07.01.2.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	1 unit	20.000.000	25.000.000	25,00
21	4.04.4.04.07.01.2.24	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	60 unit	40.000.000	75.000.000	87,50
22	4.04.4.04.07.01.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	4 unit	15.000.000	15.000.000	0,00
23	4.04.4.04.07.01.2.30	Pemeliharaan rutin / berkala komputer dan perlengkapannya	32 kali	25.000.000	85.000.000	240,00
24	4.04.4.04.07.01.2.45	Pemeliharaan rutin/berkala software dan sistem informasi	3 paket	30.000.000	216.038.000	603,13

III	4.04.4.04.07.01.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	12 bulan	210.595.000	0	(100,00)
25	4.04.4.04.07.01.5.2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	150 Orang	153.245.000	0	(100,00)
26	4.04.4.04.07.01.5.4	Pelatihan teknis pelaksanaan tupoksi SKPD	50 orang	57.350.000	0	(100,00)
IV	4.04.4.04.07.01.6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	12 bulan	25.060.000	25.060.000	0,00
27	4.04.4.04.07.01.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD (TAPKIN)	4 dokumen	13.920.000	13.920.000	0,00
29	4.04.4.04.07.01.6.4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	15 buku	11.140.000	11.140.000	0,00
V	4.04.4.04.07.01.9	Program Peningkatan dan Perencanaan Penganggaran SKPD	12 bulan	53.340.000	59.340.000	11,25
30	4.04.4.04.07.01.9.1	Penyusunan data base perencanaan SKPD	2 dokumen	5.600.000	5.600.000	0,00
31	4.04.4.04.07.01.9.2	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	6 dokumen	47.740.000	53.740.000	12,57
VI	4.04.4.04.07.01.15	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	7,50%, 6,17% WTP	3.310.966.000	2.043.889.540	(38,27)
32	4.04.4.04.07.01.15.4	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	1 dokumen	22.150.000	12.266.000	(44,62)
33	4.04.4.04.07.01.15.5	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi	1 dokumen	40.800.000	43.650.000	6,99
34	4.04.4.04.07.01.15.13	Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan daerah	2 aplikasi	68.952.000	65.352.000	(5,22)
35	4.04.4.04.07.01.15.19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	12 kegiatan	65.245.000	65.245.000	0,00
36	4.04.4.04.07.01.15.29	Monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengelolaan pendapatan daerah	4 kegiatan	1.198.950.000	412.800.000	(65,57)
37	4.04.4.04.07.01.15.33	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah pengelolaan eks bondo desa yang desanya berubah status menjadi kelurahan	318 ha	38.300.000	38.300.000	0,00
38	4.04.4.04.07.01.15.36	Peningkatan efektifitas pengelola keuangan daerah	2 kegiatan	239.750.000	312.343.000	30,28
39	4.04.4.04.07.01.15.37	Penyusunan pelaporan semesteran aset/barang PD	10 buku	2.932.500	2.932.500	0,00
40	4.04.4.04.07.01.15.38	Penyusunan perhitungan potensi pajak dan target pendapatan	2 dokumen	133.900.000	139.450.000	4,14
41	4.04.4.04.07.01.15.39	Penyusunan laporan pendapatan daerah	4 kali	13.012.500	11.561.500	(11,15)
42	4.04.4.04.07.01.15.40	Penyusunan pemutakhiran data pajak daerah	1 kegiatan	470.070.000	10.765.040	(97,71)
43	4.04.4.04.07.01.15.41	Pendataan wajib pajak	12 kali	113.900.000	92.400.000	(18,88)

44	4.04.4.04.07.01.15.42	Penyusunan rekonsiliasi data pelaksanaan pendapatan daerah	12 kali, 12 buku	12.239.000	7.739.000	(36,77)
45	4.04.4.04.07.01.15.43	Penelitian/pemeriksaan Obyek Pajak dan Wajib Pajak	12 bulan, 11 pajak	60.000.000	35.000.000	(41,67)
46	4.04.4.04.07.01.15.44	Penilaian, penetapan dan pencetakan Surat Ketetapan Pajak Daerah	671.700 SPPT	340.080.000	319.550.000	(6,04)
47	4.04.4.04.07.01.15.45	Penerbitan dan pendistribusian Surat etetapan Pajak Daerah (SKPD/SPPT/DHKP)	671.700 SPPT	66.600.000	52.450.000	(21,25)
48	4.04.4.04.07.01.15.46	Penyusunan daftar tunggakan pajak	12 kali, 120 buku	8.920.000	8.920.000	0,00
49	4.04.4.04.07.01.15.47	Penerbitan dan penyampaian surat tagihan dan surat teguran	12 kali	250.390.000	233.390.000	(6,79)
50	4.04.4.04.07.01.15.49	Penyelesaian pengaduan dan pelayanan pengajuan keberatan	12 kali, 140 pengaduan	22.670.000	32.670.000	44,11
51	4.04.4.04.07.01.15.51	Penyelesaian pengaduan dan pelayanan permohonan pengurangan ketetapan pajak/pembetulan /pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar	12 kali, 160 pengaduan	35.305.000	35.305.000	0,00
52	4.04.4.04.07.01.15.52	Pengadaan Papan Himbauan Informasi Pajak Daerah	6 paket	100.000.000	105.000.000	5,00
53	4.04.4.04.07.01.15.53	Legalisasi karcis/ benda berharga	12 kali, 10 jenis	6.800.000	6.800.000	0,00

Anggaran Belanja Langsung per sasaran strategis Tahun 2020 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pematang Jaya yang dikelola untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.7

**Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis
Bapenda Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2020**

No	Sasaran Strategis	Anggaran (RP)	(%)	Program	Keterangan
1.	Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta efisien dalam pemanfaatan APBD	1.195.019.960,00	34,69%	Didukung oleh 5 program 1. Program pelayanan administrasi perkantoran 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatus 3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 4. Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD	Sekretariat
		2.250.195.040,00	65,31%	Didukung oleh 1 program 1. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Bidang-bidang

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas merupakan salah satu pilar yang menopang pemerintahan menuju good governance sehingga mampu menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintah telah memenuhi tugasnya dalam memnerikan pelayanan kepada masyarakat. Kerangka pengukuran kinerja di Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

PENGUKURAN CAPAIAN INDIKATOR SASARAN

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, untuk pengukuran indikator rasio realisasi PAD terhadap potensi/target PAD. Untuk mengetahui capaian target yang telah ditetapkan digunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

2. Formulasi pengukuran indikator kinerja peningkatan pertumbuhan PAD , untuk membandingkan pendapatan tahun n-1 dengan tahun n digunakan rumus perhitungan :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi tahun n} - \text{realisasi tahun n-1}}{\text{Realisasi tahun n-1}} \times 100 \%$$

Adapun dalam penyusunan laporan ini, pedoman yang digunakan untuk menggambarkan skala nilai peringkat kinerja adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana yang tercantum dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja Ordinal

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	≥ 91 %	Sangat Baik
2	76 -- 90 %	Tinggi
3	66 -- 75 %	Sedang
4	51 -- 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

A CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Pematang telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Pematang yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pematang dan Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pematang Tahun 2016-2021, selanjutnya IKU tersebut menjadi kerangka acuan untuk menetapkan Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2020. Berdasarkan hal tersebut, diharapkan semua program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dapat dihitung persentase capaian kinerjanya guna menilai sejauh mana indikator kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2020.

1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pematang, diharapkan semua program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dapat dihitung persentase capaian kinerjanya guna menilai sejauh mana indikator kinerja

yang telah ditetapkan pada tahun 2020, capaian indikator kinerja utama dan indikator program dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2

Capaian indikator Kinerja atas Perjanjian Bapenda Kabupaten Pemalang Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian Kinerja	% Akhir RPJMD 2021	Kinerja s?d 2020 (%)
1	Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta efisien dalam pemanfaatan APBD	1 Rasio Realisasi PAD terhadap potensi/target PAD	7,50	12,31	164,13	157,82	17,77
		2 Peningkatan Pertumbuhan PAD	6,17	-7,75	-125,61	-125,00	16,63

Sumber : Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Capaian Indikator kinerja program, Bapenda Kabupaten Pemalang dalam tahun 2020 melaksanakan program pengelolaan pendapatan daerah yang dikelola oleh 3 bidang. Adapun capaian indikator kinerja program, dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.3

Capaian Indikator Kinerja Program Bapenda Kabupaten Pemalang Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Program	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian Kinerja (%)	% Akhir RPJMD 2021	Ket
1	Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta efisien dalam pemanfaatan APBD	1 Rasio Pajak daerah terhadap PAD	17,5	25,87	147,83	147,83	Bidang Perencanaan Pendapatan
		2 Persentase WP tertagih/persentase data pajak yang ditetapkan (PBB)	70	68,33	97,61	97,61	Bidang Pendataan dan Penetapan
		3 Rasio pajak daerah terhadap target	100	112,66	112,68	112,68	Bidang Penagihan dan Keberatan

Sumber : Renstra Tahun 2016-2021

2 KAJIAN PERENCANAAN DAN ANALISA

Analisa capaian dilakukan terhadap capaian indikator kinerja utama dan program yang berpengaruh terhadap perwujudan sasaran strategis. Analisa juga dilakukan dengan membandingkan capaian tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 serta mengkaitkannya dengan dengan kemungkinan tercapainya sasaran tahun terakhir Renstra tahun 2016-2021.

Analisi terhadap sasaran strategis dan indikator yang ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pematang Jaya untuk mewujudkan tujuan strategis pada akhir masa renstra tahun 2021 sebagai berikut :

Sasaran strategis :

Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta efisien dalam pemanfaatan APBD

Tabel 3.4

Pengukuran Indikator Kinerja Bapenda Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2020

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun Lalu		Realisasi 2019 (%)	Tahun 2020			% Akhir RPJMD 2021	Kinerja s?d 2020 (%)
	2017	2018		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)		
1 Rasio Realisasi PAD terhadap potensi/target PAD	18,51	22,06	18,19	7,50	12,31	164,13	157,82	17,77
2 Peningkatan/ Pertumbuhan PAD	41,12	18,42	14,73	6,17	-7,75	-125,61	-125,00	16,63

Adapun formulasi pengukuran Indikator Kinerjanya adalah sebagai berikut :

- 1) Formulasi pengukuran indikator 1 Rasio realisasi PAD terhadap potensi/target PAD. Untuk mengetahui capaian perbandingan realisasi PAD terhadap pendapatan daerah , apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, sebagai berikut :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Pendapatan}} \times 100 \%$$

Realisasi PAD 2020 : sejumlah Rp. 83.379.207.077,00
 Target PAD 2020 : sejumlah Rp. 74.242.354.000,00

$$\begin{aligned} \text{Capaian indikator kinerja} &= \frac{83.379.207.077,00}{74.242.354.000,00} \times 100 \% \\ &= 112,31 \% \end{aligned}$$

Dengan penjelasan sebagai berikut : Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola Bapenda Kabupaten Pematang Jaya yaitu Pajak Daerah realisasi Rp.80.577.029.532,00,- dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (Sewa tanah eks bondo desa) realisasi Rp. 2.802.177.545,00,- maka realisasi PAD tahun 2020 sejumlah **Rp. 83.379.207.077,00** dan target PAD sebesar **Rp.74.242.354.000,00** (target Pajak Daerah Rp.71.521.800.000,00,- dan target sewa tanah eks bondo desa Rp.2.720.553.000,00) dengan capaian kinerja sebesar 112,31 % sehingga mengalami kenaikan 12,31% ,sedangkan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 adalah 7,50%, persentase capaian kinerjanya sebesar 164,13 % ,atau penilaian dengan pengukuran skala ordinal masuk dalam kategori **SANGAT BAIK**, terhadap akhir Renstra tahun 2021 dengan target 7,80% persentasenya sebesar 157,82%

- 2) Formulasi pengukuran indikator 2 Peningkatan/ pertumbuhan PAD (Pajak daerah dan Sewa tanah eks bondo desa) , untuk membandingkan peningkatan/pertumbuhan PAD tahun 2019 dengan PAD tahun 2020 digunakan rumus perhitungan:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Jumlah realisasi PAD tahun } n - \text{realisasi PAD tahun } n-1}{\text{PAD tahun } n-1} \times 100 \%$$

Realisasi PAD 2020 : sejumlah **Rp. 83.379.207.077,00**
 Realisasi PAD 2019 : sejumlah **Rp. 74.242.354.000,00**

$$\begin{aligned} \text{Capaian indikator kinerja} &= \frac{83.379.207.077,00 - 74.242.354.000,00}{74.242.354.000,00} \times 100 \% \\ &= -7,75 \% \end{aligned}$$

Dengan penjelasan sebagai berikut : Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola Bapenda Kabupaten Pemalang yaitu Pajak Daerah realisasi Rp.80.577.029.532,00,- dan Lain-lain Pendapapatan Asli Daerah (Sewa tanah eks bondu desa) realisasi Rp. 2.802.177.545,00,- maka realisasi PAD tahun 2020 sejumlah **Rp. 83.379.207.077,00** dan dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2019 lebih tinggi sebesar Rp.90.383.513.980,00 , mengalami penurunan Rp. 7.004.306.903,00. Pada tahun 2020 realisasi Peningkatan/Pertumbuhan PAD capaian kinerjanya -7,75%, sedangkan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kineja Tahun 2020 dan sesuai dengan target yang tertuang dalam Renstra Bapenda Kabupaten Pemalang pada Tahun 2020 sebesar 6,17%, maka persentase capaian kinerja sebesar -125,61%, dengan pengukuran skala ordinal masuk dalam kategori **SANGAT RENDAH**, dibandingkan dengan target akhir Renstra 2021 sebesar 6,20, persentase capaiannya -125,00%

Capaian Indikator kinerja program, Bapenda Kabupaten Pemalang dalam tahun 2020 melaksanakan program pengelolaan pendapatan daerah yang dikelola oleh 3 bidang. Adapun capaian indikator kinerja program , dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.5
Pengukuran Indikator Kinerja Program Bapenda Kabupaten Pemalang Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Program	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian Kinerja (%)	% Akhir RPJMD 2021	Ket
1	Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta efisien dalam pemanfaatan APBD	1 Rasio Pajak daerah terhadap PAD	17,5	25,87	147,83	147,83	Bidang Perencanaan Pendapatan
		2 Persentase WP tertagih/data pajak yang ditetapkan (PBB)	70	68,33	97,61	97,61	Bidang Pendataan dan Penetapan
		3 Rasio pajak daerah terhadap target	100	112,66	112,65	112,65	Biadang Penagihan dan Keberatan

a. Sumber : Renstra Tahun 2016-2021

Penjelasan dari tabel diatas sebagai berikut :

- a. Formulasi pengukuran indikator 1 Persentase realisasi Pajak daerah terhadap PAD, untuk mengetahui Jumlah pajak daerah yang terealisasi dibagi realisasi PAD, dengan rumus perhitungan :

$$\begin{aligned} \text{Capaian indikator kinerja} &= \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100 \% \\ &= \frac{80.577.029.532,00}{311.455.681.803,00} \times 100 \% \\ &= 25,87 \% \end{aligned}$$

Dengan penjelasan sebagai berikut : realisasi Pajak Daerah tahun 2020 sebesar Rp.80.577.029.532,00 sedangkan realisasi PAD tahun 2020 terdiri dari (Pajak daerah dan Retribusi daerah) sebesar Rp.311.455.681.803,00 dikalikan 100% ,realisasi Pajak Daerah terhadap PAD tahun 2020 sebesar 25,87 %, dan persentase capaian kinerjanya sebesar 147,83%, dengan pengukuran skala ordinal masuk dalam kategori **SANGAT BAIK**, terhadap target akhir Renstra tahun 2021 sebesar 147,83%.

- b. Formulasi pengukuran indikator 2 Persentase Wajib Pajak tertagih/data pajak daerah yang ditetapkan (PBB) , untuk mengetahui jumlah data pajak yang terealisasi (WP) dibagi data pajak yang ditetapkan, dengan rumus perhitungan :

$$\begin{aligned} \text{Capaian indikator kinerja} &= \frac{\text{Jumlah Wajib Pajak tertagih}}{\text{Data pajak yang ditetapkan(PBB)}} \times 100 \% \\ &= \frac{476.854}{697.891} \times 100 \% \\ &= 68,33 \% \end{aligned}$$

Dengan penjelasan sebagai berikut : Jumlah data pajak yang terealisasi (WP) sejumlah 476.854 dibagi data pajak yang ditetapkan sejumlah 697.891 dikalikan 100%, capaian kinerjanya 68,33 %, sedangkan target yang ditetapkan dalam Renstra Tahun 2016-2021 sebesar 70% adanya persentase capaian kinerja sebesar 97,61 %, dengan pengukuran skala ordinal masuk dalam kategori **SANGAT BAIK**, terhadap target akhir Renstra tahun 2021 sebesar 97,61%.

- c. Formulasi pengukuran indikator 3 Persentase pajak daerah terhadap target, untuk mengetahui jumlah pajak daerah yang terealisasi dibandingkan dengan target pajak daerah yang ditetapkan, dengan rumus perhitungan

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi pendapatan pajak daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100 \%$$

Pendapatan Pajak daerah Tahun 2020 = Rp. 80.569.759.532,00

Penetapan Pajak daerah tahun 2020 = Rp. 71.521.800.000,00

$$\begin{aligned} \text{Capaian indikator kinerja} &= \frac{80.569.759.532,00}{71.521.800.000,00} \times 100 \% \\ &= 112,65 \% \end{aligned}$$

Dengan penjelasan sebagai berikut : realisasi pendapatan pajak daerah tahun 2020 sebesar Rp.80.569.759.532,00 sedangkan target pajak daerah yang ditetapkan tahun 2020 sebesar Rp.71.521.800.000,00, dikalikan 100%, sehingga capaian kinerjanya 112,65 %, dengan pengukuran skala ordinal masuk dalam kategori **SANGAT BAIK**. terhadap target akhir Renstra tahun 2021 sebesar 112,65%.

Adapun perbandingan capaian kinerja, target dan realisasi capaian kinerja indikator 1 Rasio realisasi PAD terhadap target pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 sebagaimana pada tabel berikut ini :

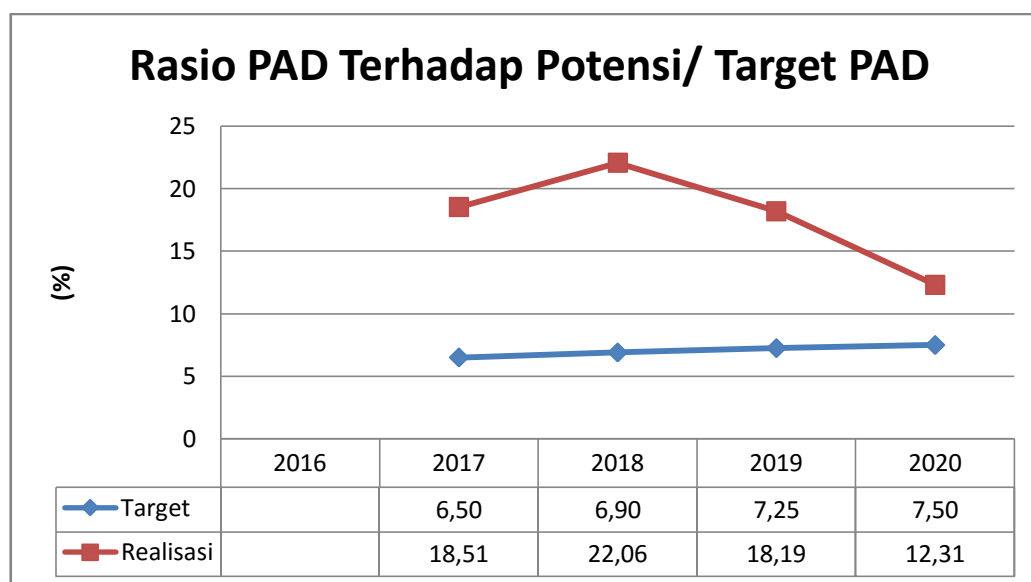
Tabel : 3.6.
Capaian Kinerja Indikator 1
Perbandingan Tahun 2017 s/d 2020

No	Indikator Kinerja Program	Unit (%)	Target dan realisasi kinerja											
			2017			2018			2019			2020		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Rasio PAD terhadap potensi/ target PAD	%	6,50	18,51	284,77	6,90	22,06	319,71	7,25	18,19	250,90	7,50	12,31	164,13
	Rata-rata capaian kinerja	%			284,77			319,71			250,90			164,13

Perbandingan capaian kinerja Rasio PAD terhadap potensi/target PAD sebagaimana tabel diatas. Untuk tahun 2017 target 6,50% realisasinya 18,51% atau 284,77%, tahun 2018 target 6,90% realisasinya 22,06 atau 319,71%, tahun 2019 target 7,25% realisasi 18,19% dan tahun 2020 dengan target 7,50% realisasnya 12,31% persentase capaiannya 164,13%, terhadap akhir Renstra tahun 2021 dengan target 7,80% persentase capaiannya sebesar 157,82%

Untuk mengetahui perkembangan pencapaian target kinerja Rasio PAD terhadap potensi /target PAD pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik.3.1.



Berdasarkan grafik 3.1 bahwa capaian kinerja rasio PAD terhadap potensi/target PAD pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 realisasinya melebihi target yang telah ditetapkan, Secara umum realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 menunjukkan adanya kinerja yang baik. Hal ini dapat dilihat dari terlampauinya target Pendapatan Asli Daerah yang dikelola Bapenda Kabupaten Pemalang yaitu Pajak Daerah dan Lain-lain PAD (Sewa tanah eks bondo desa) Tahun 2020 yakni sebesar Rp.83.379.207.077,00 mencapai 112,31 dari target yang ditetapkan sebesar Rp.74.242.354.000,00. sedangkan target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja sebesar 7,50% persentase capaian 164,13%, secara rinci PAD Bapenda dalam tabel dibawah ini :

Tabel.3.7

Capaian Realisasi PAD Yang Dikelola Bapenda Kabupaten Pemalang Tahun 2020

No	Uraian	Target Semula (Rp)	Target Perubahan (Rp)	Realisasi s/d 31 Desember 2020	(%) Capaian
1	Pendapatan Pajak Daerah	79.300.000.000,00	71.521.800.000,00	80.577.029.532,00	112,66 %
2.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (Sewa Tanah Eks Bondo Desa)	2.645.000.000,00	2.720.553.000,00	2.802.177.545,00	103,00 %
	JUMLAH	81.945.000.000,00	74.242.354.000,00	83.379.207.077,00	112,13%

Indikator Kinerja 2

Capaian Indikator Kinerja 2 : Pertumbuhan PAD .Pada tahun 2020 Pendapatan Asli Daerah yang dikelola Bapenda Kabupaten Pemalang realisasi sebesar Rp.83.379.207.077,00 , sedangkan tahun 2019 realisasinya lebih tinggi sebesar Rp.90.383.513.980,00,- persentase pertumbuhan PAD dengan target 6,17% realisasinya -7,75% sehingga persentase capaian kinerjanya – 125,61% , atau penilaian dengan pengukuran skala ordinal masuk dalam kategori **SANGAT RENDAH**

Adapun perbandingan capaian, target dan realisasi kinerja pertumbuhan PAD tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 secara keseluruhan menunjukkan adanya peningkatan capaian kinerja dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan capaian kinerja dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

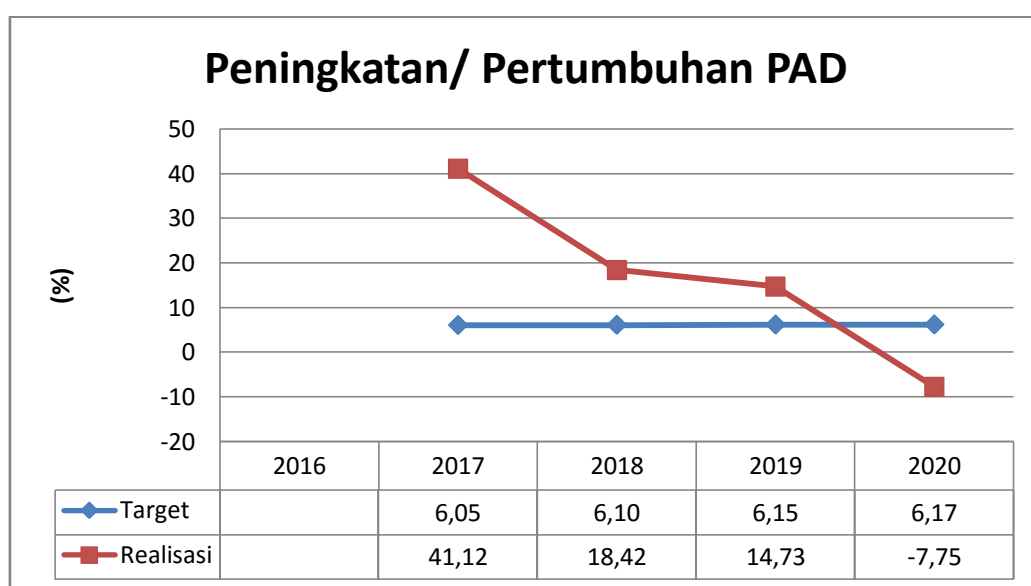
Tabel : 3.8.

**Capaian Kinerja Indikator 2
Perbandingan Tahun 2017 s/d Tahun 2020**

No	Indikator Kinerja Program	%	Target dan realisasi kinerja											
			2017			2018			2019			2020		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Pertumbuhan PAD	%	6,05	41,12	679,67	6,10	18,42	301,97	6,15	14,73	239,51	6,17	-7,75	-125,61
	Rata-rata capaian kinerja	%			679,67			301,97			239,51			-125,61

Perbandingan capaian kinerja peningkatan/pertumbuhan PAD untuk tahun 2017 dengan capaian yang tinggi sebesar 41,12 % karena dana BOS diikutkan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah, tahun 2018 dan tahun 2019 juga mengalami peningkatan , namun di tahun 2020 mengalami penurunan capaian kinerja sebesar -7,75% dengan persentase capaian kinerja sebesar -125,61% , persentase capaian tahun 2020 dibandingkan dengan target akhir Renstra 2021 sebesar 6,20, persentase capaiannya -125%, untuk mengetahui perkembangan pencapaian target kinerja peningkatan/pertumbuhan PAD dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik.3.2.



Berdasarkan grafik 3.2 bahwa realisasi kinerja pertumbuhan PAD tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 sudah melebihi target yang telah ditetapkan, namun tahun 2020 realisasi belum memenuhi target bahkan menurun.

Pencapaian sasaran strategis Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta efisien dalam pemanfaatan APBD didukung oleh 5 Program yaitu :

- 1) Program pelayanan administrasi perkantoran, dengan anggaran Rp.1801.887.960,00, realisasi Rp.787.731.034,00 atau realisasi anggaran sebesar 98,23 % sisa anggaran Rp. 14.156.926,00, efisiensi anggaran 1,77%;
- 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dengan anggaran Rp.515.037.500,00, realisasi Rp.508.615.659,00, atau realisasi anggaran sebesar 98,75% sisa anggaran Rp.6.421.841,00, efisiensi anggaran 1,25%;

- 3) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dengan anggaran Rp.25.060.000,00, realisasi Rp.25.060.000,00, atau realisasi anggaran sebesar 100%, sisa anggaran Rp.0,00, efisiensi anggaran 0%;
- 4) Program peningkatan perencanaan dan penganggaran, dengan anggaran Rp.59.340.000,00, realisasi Rp.58.925.800,00 atau realisasi anggaran sebesar 99,30%, sisa anggaran Rp.414.200,00, efisiensi anggaran 0,70%;
- 5) Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, dengan anggaran sebesar Rp.2.043.889.540,00, realisasi Rp.1.917.807.674,00 atau realisasi anggaran sebesar 93,83%, sisa anggaran Rp.126.081.866,00, efisiensi anggaran 6,17%;

Total anggaran pada program diatas adalah **Rp.3.445.215.000,00** dengan capaian realisasi **Rp.3.298.149.167,00** dengan prosentase **95,73%** ,sehingga terdapat sisa anggaran **Rp 147.074.833,00**, atau efisiensi sebesar **4,27%**.

Upaya optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang dikelola Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pematang sudah berjalan cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan tercapainya target , yaitu dari target Rp.74.242.354.000,00,- dan terealisasi Rp.83.379.207.077,00,- atau 112,31% yang berhasil melampaui target.

Dalam melaksanakan upaya untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah yang dikelola Bapenda Kabupaten Pematang dipengaruhi oleh beberapa hal yang menjadi pendukung. Faktor-faktor pendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah antara lain :

- 1) Kerjasama yang baik antar bidang maupun instansi;
- 2) Intensifikasi dan ekstensifikasi potensi pajak dan retribusi.
- 3) Reward bagi wajib pajak dan petugas pemungut pajak;
- 4) Adanya stimulan berupa pembebasan sanksi administrasi/denda pembayaran pajak yang terhutang mulai tanggal 1 Agustus sampai dengan 31 Desember 2020;

Meskipun sasaran sudah mampu mencapai target pada indikator 1, namun dalam dalam pencapaiannya indikator 2 peningkatan/pertumbuhan PAD masih sangat rendah capaiannya , adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat anatar lain:

- 1) Adanya wabah pandemi covid 19 yang terjadi tahun 2020, kondisi ini menyebabkan melemahnya perekonomian masyarakat, menurunkan kemampuan dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
- 2) Kinerja pelayanan pajak yang belum memadai dibandingkan dengan tuntutan masyarakat yaitu masih terbatasnya tempat pelayanan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah;
- 3) Belum efektifnya regulasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD);
- 4) Belum optimalnya pengelolaan sistem informasi daerah;
- 5) Masih belum optimalnya pengawasan pemungutan pajak daerah dan retribus daerah;

- 6) Tingkat kesadaran wajib pajak daerah dan retribusi daerah belum semuanya membayar sesuai dengan ketentuan;

Capaian Kinerja Program Indikator 1

Capaian Indikator Kinerja Program : Rasio Pajak Daerah terhadap PAD ,realisasi Pajak Daerah tahun 2020 sebesar Rp.80.577.029.532,00 sedangkan realisasi PAD tahun 2020 sebesar Rp.311.455.681.803,00 ,realisasi Pajak Daerah terhadap PAD tahun 2020 capaian kinerjanya 25,87 % untuk presentase capaian kinerjanya 147,83% dengan pengukuran skala ordinal masuk dalam kategori **SANGAT BAIK**.

Adapun perbandingan capaian kinerja, target dan realisasi capaian kinerja Program indikator 1 Rasio Pajak Daerah terhadap PAD pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 persentasenya sebagaimana pada tabel berikut ini :

Tabel : 3.9

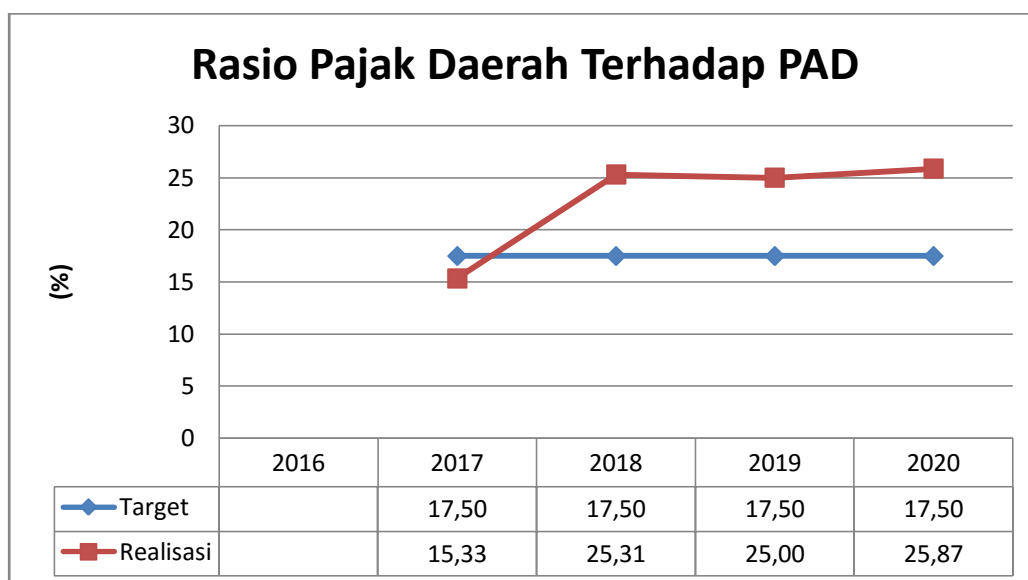
Capaian Kinerja Program Indikator 1 Perbandingan Tahun 2017 s/d Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Program	Unit (%)	Target dan realisasi kinerja											
			2017			2018			2019			2020		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Rasio pajak daerah terhadap PAD	%	17,50	15,33	87,60	17,50	25,31	144,63	17,50	25,00	142,86	17,50	25,87	147,83
	Rata-rata capaian kinerja	%			87,60			144,63			142,86			147,83

Perbandingan capaian kinerja rasi pajak daerah terhadap PAD sebagaimana tabel .3.6, dengan target 17,50 realisasin tahun 2017 sebesar 15,33 atau 87,60%, tahun 2018 realisasi sebesar 25.31 atau 144,63%, tahun 2019 realisasi sebesar 25,00 atau 142,86% dan tahun 2020 realisasi 25,87 atau 147,83% dibandingkan dengan target yang ditetapkan masa akhir Renstra Tahun 2021 sebesar 17,5% adanya kenaikan capaian kinerja 147,83 %.

Untuk mengetahui perkembangan pencapaian target tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik.3.3



Berdasarkan grafik.3.3 capaian kinerja rasio pajak daerah terhadap PAD dari target 17,50 mengalami kenaikan mulai dari tahun 2018 sebesar 25,31, tahun 2019 sebesar 25,00 sampai dengan tahun 2020 sebesar 25,87

Pencapaian indikator Program 1 : Rasio pajak daerah terhadap PAD APBD didukung oleh 10 kegiatan yaitu :

- 1) Kegiatan pemeliharaan rutin berkala software dan sistem informasi Rp.211.350.000,00,- realisasi Rp.210.996.000,00,- atau 97,67% , sisa anggaran Rp.5.042.000,00,- efisiensi 2,33%
- 2) Kegiatan penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah Rp.12.266.000,00,- realisasi Rp.12.195.500,00,- atau realisasi anggaran 99,43%, sisa anggaran Rp.70.500,00,- efisiensi 0,57%
- 3) Kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi Rp.43.650.000,00,- realisasi 43.500.715,00,- atau realisasi anggaran 99,66%, sisa anggaran Rp.149.285,00,- efisiensi 0,34%
- 4) Kegiatan penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah Rp.65.352.000,00,- realisasi Rp.63.029.828,00,- atau realisasi anggaran 96,45% sisa anggaran Rp.2.322.172,00,- efisiensi 3,55%
- 5) Kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah Rp.65.245.000,00,- realisasi Rp. 64.397.290,00,- atau realisasi anggaran 98,70%, sisa anggaran Rp.847.750,00,- efisiensi 1,3%

- 6) Kegiatan monitoring, evaluasi pelaporan dan pengelolaan pendapatan daerah Rp.412.800.000,00,- realisasi Rp.334.439.109,00,- atau realisasi anggaran 81,02%, sisa anggaran Rp.78.360.891,00,- efisiensi 18,98%
- 7) Kegiatan peningkatan efektifitas pengelolaan keuangan daerah Rp.312.343.500,00,- realisasi Rp.297.238.757,00,- atau realisasi anggaran 95,16%, sisa anggaran Rp.15.104.743,00,- efisiensi 4,84%
- 8) Kegiatan penyusunan perhitungan potensi pajak dan target pendapatan Rp.139.450.000,00,- realisasi Rp.139.393.952,00,- atau realisasi anggaran 99,96% ,sisa anggaran Rp.56.048,00 efisiensi 0,04%
- 9) Kegiatan penyusunan laporan pendapatan daerah Rp.11.561.500,00,- realisasi Rp.11.295.000 atau realisasi anggaran 97,69%, sisa anggaran Rp.266.500,00 efisiensi 2,31%
- 10) Kegiatan pengadaan papan himbauan informasi pajak daerah Rp.105.000.000,00,- realisasi Rp.104.410.000,00,- atau realisasi anggaran 99,44%, sisa anggaran Rp.590.000,00,- efisiensi 0,56%

Capaian Kinerja Program Indikator 2

Capaian Indikator Kinerja Program : Persentase wajib pajak tertagih/persentase data pajak daerah yang ditetapkan , realisasi wajib pajak yang tertagih atau data pajak yang terealisasi (WP) sejumlah 476.854 sedangkan data pajak yang ditetapkan sejumlah 697.891 , capaian kinerjanya 68,33 %, sedangkan target yang ditetapkan akhir Renstra Tahun 2021 sebesar 70% adanya capaian kinerja 97,61 % dengan pengukuran skala ordinal masuk dalam kategori **SANGAT BAIK**.

Adapun perbandingan capaian kinerja, target dan realisasi capaian kinerja Program indikator 2 Persentase Wajib Pajak tertagih/persentase data pajak yang ditetapkan (PBB) pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 persentasenya sebagaimana pada tabel berikut ini :

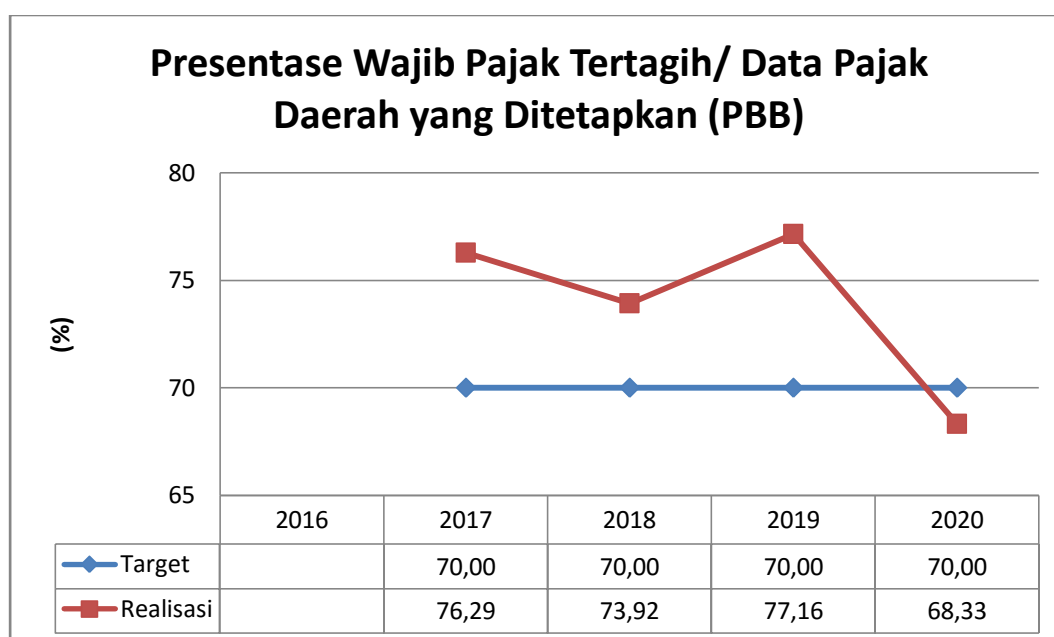
Tabel : 3.10

**Capaian Kinerja Program Indikator 2
Perbandingan Tahun 2017 s/d 2020**

No	Indikator Kinerja Program	Unit (%)	Target dan realisasi kinerja											
			2017			2018			2019			2020		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase wajib pajak tertagih/data pajak daerah yang ditetapkan (PBB)	%	70,00	76,29	108,98	70,00	73,92	105,60	70,00	77,16	110,23	70,00	68,33	97,61
	Rata-rata capaian kinerja	%			108,98			105,60			110,23			97,61

Perbandingan capaian kinerja Persentase wajib pajak tertagih/data pajak daerah yang ditetapkan (PBB) sebagaimana tabel diatas, dengan target 70 realisasin tahun 2017 sebesar 76,289 atau 108,98%, tahun 2018 realisasi sebesar 73,92 atau 105,60%, tahun 2019 realisasi sebesar 77,16 atau 110,23% dan tahun 2020 realisasi 68,33 atau 97,61% dibandingkan dengan target yang ditetapkan masa akhir Renstra Tahun 2021 sebesar 17,5% adanya kenaikan capaian kinerja 97,61 %. Untuk mengetahui perkembangan pencapaian target tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik.3.4



Berdasarkan grafik 3.4 perkembangan pencapaian target tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan dari target yang telah ditetapkan, namun pada pencapaian tahun 2020 menurun dari target 70,00% menjadi 68,33% capaian kinerjanya 97,614%.

Pencapaian sasaran pada indikator Persentase wajib pajak tertagih/data pajak yang ditetapkan (PBB) didukung oleh 6 kegiatan yaitu :

- 1) Kegiatan Penyusunan pemutahiran pajak daerah Rp.10.765.000,00,- realisasi Rp.10.765.000,00,- atau realisasi anggaran 100%, efisiensi 0%.
- 2) Kegiatan Pendataan wajib pajak Rp.92.400.000,00,- realisasi Rp.84.162.254,00,- atau realisasi anggaran 91,08%, sisa anggaran Rp.8.237.746,00,- efisiensi 8,92%.
- 3) Kegiatan penyusunan rekonsiliasi data pelaksanaan pendapatan daerah Rp.7.739.000,00,- realisasi Rp.7.264.313,00,- atau realisasi anggaran 93,87%, sisa anggaran Rp.474.687,00,- efisiensi 6,13%.
- 4) Kegiatan penelitian/pemeriksaan obyek pajak dan wajib pajak Rp.35.000.000,00,- realisasi Rp.33.432.606,00,- atau realisasi anggaran 95,52%, sisa anggaran Rp.1.567.394,00,- efisiensi 4,48%.
- 5) Kegiatan penilaian, penetapan dan pencatatan surat ketetapan pajak daerah Rp.319.550.000,00,- realisasi Rp.316.259.100,00,- atau realisasi anggaran 98,97%, sisa anggaran Rp.3.290.900,00,- efisiensi 1,03%.
- 6) Kegiatan penerbitan dan pendistribusian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD/SPPT/DHKP) Rp.52.450.000,00,- realisasi Rp.49.168.450,00 atau realisasi anggaran 93,74%, sisa anggaran Rp.3.281.550,00,- efisiensi 6,26%.

Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian indikator program 2 : Persentase wajib pajak tertagih/data pajak yang ditetapkan (PBB) antara lain :

- 1) Masih kurang validnya database wajib pajak yang harus disimpan dalam aplikasi e-SIMPATDA dan e-PBB (Sismiop) dan jaringan sering mengalami gangguan sehingga menghambat dalam proses pemungutan pajak
- 2) Data base PBB P2 belum secara keseluruhan termutakhirkan sejak pelimpahan kewenangan dari pusat kepada Kabupaten/kota tahun 2013 dan perkembangan dinamika obyek pajak selain PBB P2 belum sesuai dengan data pajak yang ada;
- 3) Belum optimalnya pengelolaan sistem informasi daerah;
- 4) Kurang intersifnya petugas pemungut maupun petugas penagih pajak.

Capaian Kinerja Program Indikator 3

Capaian Indikator Kinerja Program : Persentase pajak daerah terhadap target , realisasi pendapatan pajak daerah tahun 2020 sebesar Rp.80.569.759.532,00 sedangkan target pajak daerah yang ditetapkan tahun 2020 sebesar Rp.71.521.800.000,00, sehingga tercapai sebesar 112,66 %, atau penilaian dengan pengukuran skala ordinal masuk dalam kategori **SANGAT BAIK**.

Adapun perbandingan capaian kinerja, target dan realisasi capaian kinerja Program indikator 3 Persentase Pajak Daerah terhadap target pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 persentasenya sebagaimana pada tabel berikut ini :

Tabel :3.11

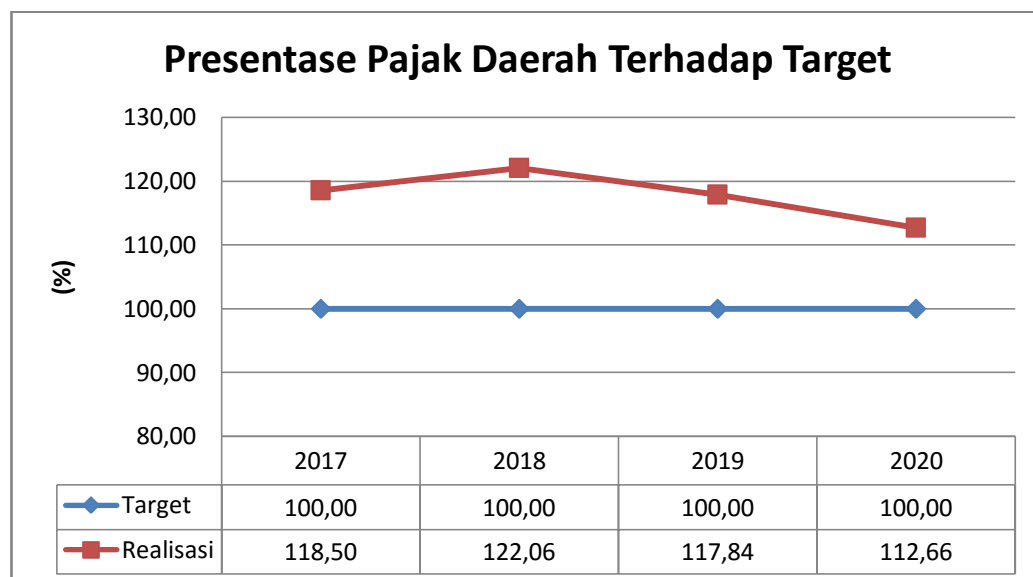
**Capaian Kinerja Program Indikator 3
Perbandingan Tahun 2017 s/d 2020**

No	Indikator Kinerja Program	Unit (%)	Target dan realisasi kinerja											
			2017			2018			2019			2020		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase pajak daerah terhadap target	%	100	118,51	118,51	100	122,06	122,06	100	117,84	117,84	100	112,66	112,66
	Rata-rata capaian kinerja	%			118,51			122,06			117,84			112,66

Perbandingan capaian kinerja Presentase pajak daerah terhadap target sebagaimana tabel diatas. Untuk tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 capaian kinerjanya tercapai melampaui target , tahun 2020 capaiannya 112,67% terhadap target akhir Renstra tahun 2021 sebesar 112,67%.

Untuk mengetahui perkembangan pencapaian target kinerja indikator program : Persentase pajak daerah terhadap target tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik.3.5



Berdasarkan grafik 3.5. bahwa capaian kinerja indikator program : Persentase pajak daerah terhadap target pada tahun 2017 sampai tahun 2020 realisasinya sudah sesuai target tercapai diatas 100%.

Pencapaian sasaran indikator program 3 : Persentase pajak daerah terhadap target didukung oleh 5 kegiatan yaitu :

- 1) Kegiatan Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapaytan daerah pengelolaan eks bondo desa yang desanya berubah menjadi kelurahan Rp.38.300.000,00,- realisasi Rp.37.548.300,00,- atau realisasi anggaran 98.04%, sisa anggaran Rp.751.700.000,00,- efesiensi 1,96%
- 2) Kegiatan penyusunan daftar tunggakan pajak Rp.8.920.000,00,- realisasi Rp.8.869.000,00 atau realisasi anggaran 99,43% , sisa anggaran Rp.51.000,00,- efesiensi 0,57%
- 3) Kegiatan penerbitan dan penyampaian surat tagihan dan surat teguran Rp.233.390.000,00,- realisasi Rp.230.869.250.00,- atau realisasi anggaran 98,92%, sisa anggaran Rp. 2.520.750,00,- efesiensi 1,08%
- 4) Kegiatan penyelesaian pengaduan dan pelayanan pengajuan keberatan Rp.32.670.000,00,- realisasi Rp.28.658.000,00,- atau realisasi anggaran 87,72%, sisa anggaran Rp.4.012.000,00,- efesiensi 12,28%.
- 5) Kegiatan penyelesaian pengaduan dan pelayanan permohonan pengurangan ketetapan pajak /pembetulan/pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar Rp.35.305.000,00,- realisasi Rp.31.178.750,00,- atau realisasi anggaran 88,31%, sisa anggaran Rp.4.126.250,00,- efesiensi 11,69%

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang. Sasaran strategis yang ditetapkan oleh Bapenda Kabupaten Pemalang sebagai alat untuk mewujudkan tujuan strategis pada Renstra dilaksanakan mulai tahun 2017 sampai dengan sekarang.

Bapenda dalam upaya peningkatan pajak daerah pada tahun 2020 mengalami peningkatan dari target yang telah ditentukan, secara asumsi rata-rata capaiannya Pajak daerah keseluruhan capaian kinerja tercapai sangat baik, dengan asumsi rata-rata capaiannya Rasio pajak daerah terhadap PAD sebesar 147,83%, capaian persentase wajib pajak tertagih/data pajak daerah yang ditetapkan (PBB) menunjukkan peningkatan sebesar 97,613% dan persentase pajak daerah terhadap target mengalami peningkatan melebihi dari target yang telah ditetapkan sebesar 112,66%. , secara rinci realisasi pajak daerah dan sewa tanah eks bondo desa dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Akantetapi tidak semua jenis pajak targetnya terrealisasi ada beberapa yang tidak tercapai yaitu pajak hiburan sebesar 89,92%, dan pajak air bawah tanah sebesar 89,72%. Selain pajak daerah Bapenda juga mengelola pendapatan sewa tanah eks bondo desa disajikan pada tabel sebagai berikut ini :

Tabel : 3.12

**Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah
Bapenda Kabupaten Pemalang Tahun 2020**

No	Jenis Pajak	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Pajak Hotel	Rp.	497.000.000,00	500.376850,00	100,69
2	Pajak Restoran	Rp.	1.025.000.000,00	1.138.628.930,00	111,09
3	Pajak Hiburan	Rp.	201.000.000,00	180.748.275,00	89,92
4	Pajak Reklame	Rp.	1.275.000.000,00	1.317.148.625,00	103,31
5	Pajak Penerangan Jalan	Rp.	34.400.000.000,00	34.637.334.773,00	100,69
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Rp.	636.000.000,00	854.965.100,00	134,43
7	Pajak Parkir	Rp.	40.000.000,00	45.127.845,00	89,72

No	Jenis Pajak	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
8	Pajak Air Bawah Tanah	Rp.	165.000.000,00	148.036.720,00	89,72
9	Pajak Sarang Burung Walet	Rp.	2.800.000,00	8.200.000,00	292,86
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	Rp.	18.280.000.000,00	22.180.726.238,00	121,34
11	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Rp.	15.000.000.000,00	19.565.736.176,00	121,34
	Jumlah	Rp.	71.521.800.000,00	80.577.029.532,00	112,64

Tabel : 3.13

**Target dan Realisasi Penerimaan Lain-Lain PAD Tahun 2020
(Sewa Tanah Eks Bondo Desa)**

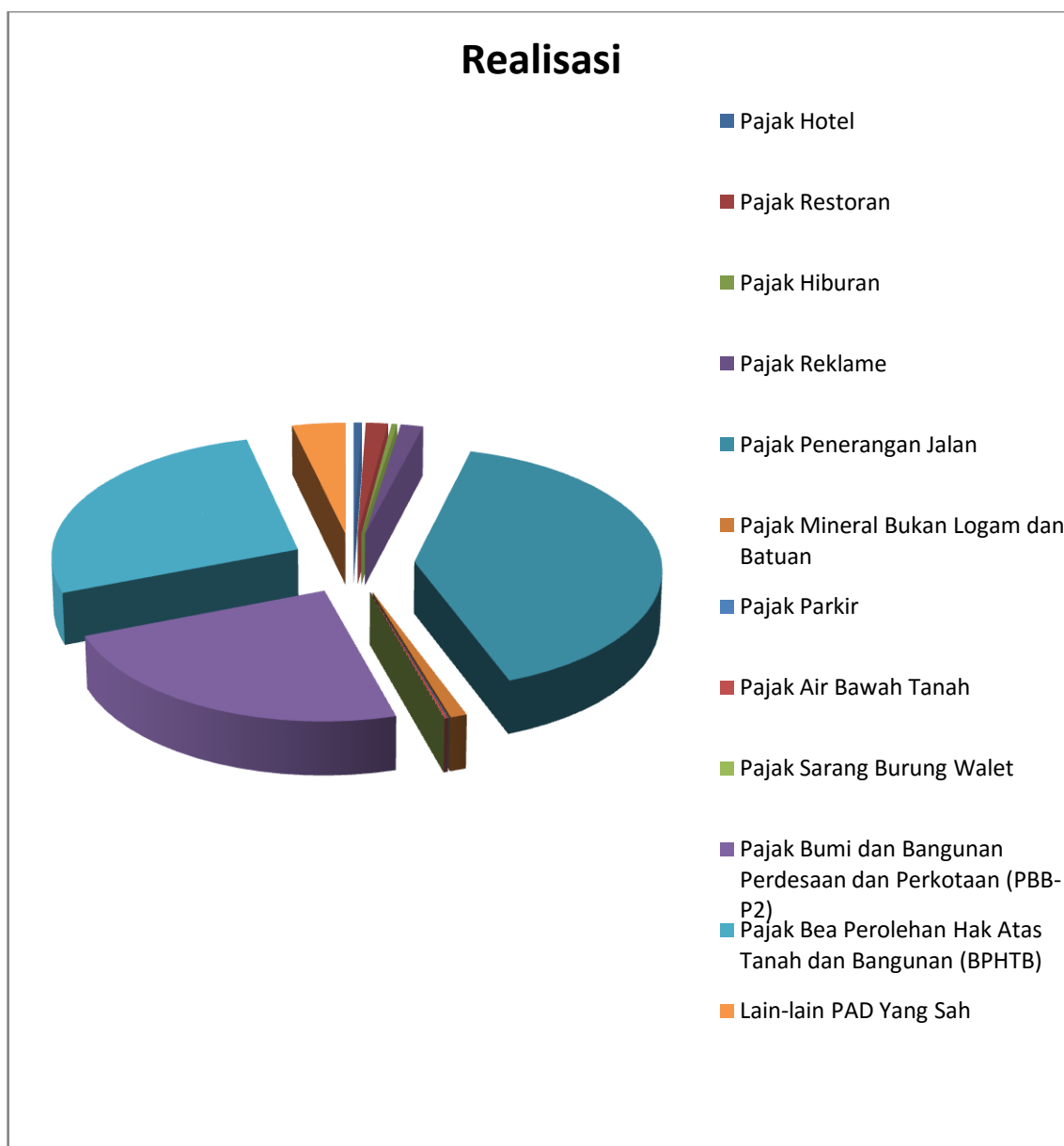
No	Jenis PAD	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Lain-lain PAD (sewa tanah eks bondo desa)	Rp.	2.720.000.000,00	2.802.177.545,00	103,00
	Jumlah	Rp.	2.720.000.000,00	2.802.177.545,00	103,00

Sumber : SIMDA Tahun 2020

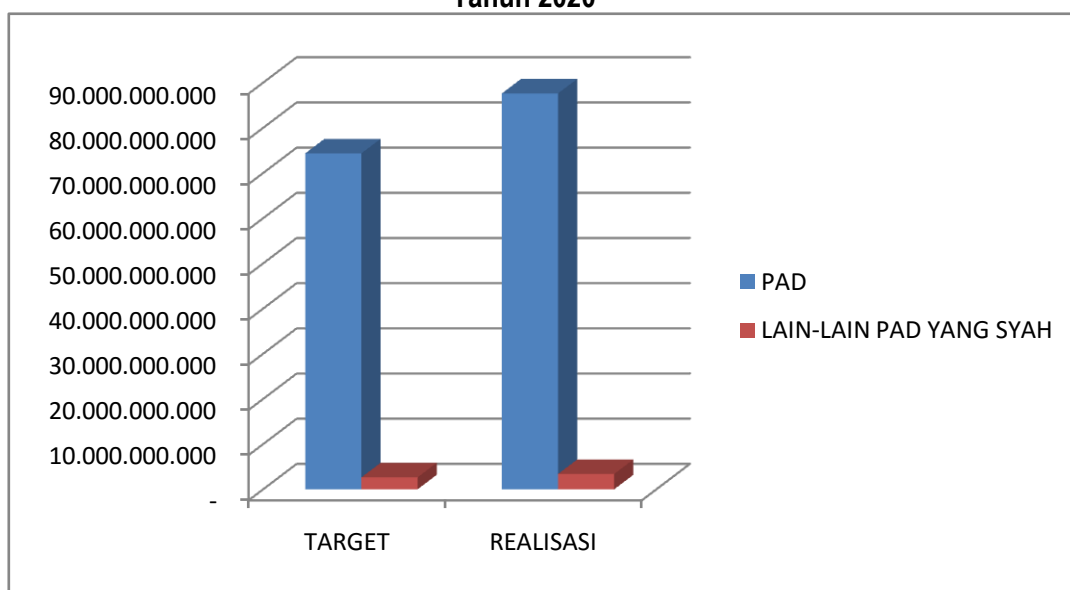
Dari data tabel diatas secara keseluruhan Pendapatan Asli Daerah dari pajak daerah terealisasi 112,64% , Akantetapi tidak semua jenis pajak targetnya terelialisasi ada beberapa yang tidak tercapai 100% yaitu pajak hiburan sebesar 89,92%, dan pajak air bawah tanah sebesar 89,72%. : sedangkan sewa tanah eks bono desa tahun 2020 menunjukkan adanya peningkatan capaian kinerja sebesar 103,00 % dari target yang telah ditetapkan dan dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik.3.6.

Realisasi Pajak Daerah Bapenda Kabupaten Pemalang Tahun 2020



Grafik. 3.7
Realisasi Pajak Daerah dan Lain-Lain PAD Yang Syah (Sewa Tanah Eks Bondo Desa
Tahun 2020



Capaian akuntabilitas kinerja pemerintah yaitu nilai evaluasi AKIP yang dilakukan oleh Evaluator Inspektorat Kabupaten Pemalang terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bapenda Kabupaten Pemalang pada tahun 2019 memperoleh nilai atau skor sebesar 52,04 dengan kategori CC (Cukup) yang diartikan bahwa akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, dengan hasil sebagai berikut :

No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
1.	Perencanaan Kinerja	30 %	16,09
2.	Pengukuran Kinerja	25 %	15,94
3.	Pelaporan Kinerja	15 %	8,38
4.	Evaluasi internal	10 %	2,38
5.	Capaian Kinerja	20 %	9,25
	Jumlah	100,00	52,04

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran strategis, khususnya terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU), selain itu dilakukan analisis dengan membandingkan dalam Renstra Bapenda Kabupaten Pemalang 2016-2021.

Analisis terhadap sasaran strategis yang ditetapkan oleh Bapenda Kabupaten Pemalang sebagai alat untuk mewujudkan tujuan strategis pada Renstra.

Secara rinci kinerja terkait Pendapatan Asli Daerah yang dilaksanakan oleh Bapenda Kabupaten Pemalang (Pajak daerah dan sewa tanah eks bondo desa) dapat dilihat dari realisasi kinerja meningkat dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 hanya ada 2 indikator yang tidak sesuai dengan target bahkan mengalami penurunan pada tahun 2020 yaitu Rasio PAD terhadap potensi/target dan pertumbuhan PAD .dari target 7,50% terealisasi sebesar 12,31% dari target kinerja 7,50% dan pertumbuhan PAD dengan target 6,17% terealisasi sebesar -7,75 . Secara umum realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 menunjukkan adanya kinerja yang baik. Hal ini dapat dilihat dari terlampauinya target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 yakni sebesar Rp.83.379.207.077,00,- dari target yang ditetapkan sebesar Rp.74.242.354.000,00 capaian kinerjanya 12,31%.

Bapenda Kabupaten Pemalang merupakan koordinator Pendapatan Asli Daerah secara keseluruhan realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.311.455.681.803,00 mencapai 106,42% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.292.672.718.000,00. Meskipun secara keseluruhan realisasi capaiannya melebihi target , jika dilihat lebih rinci ada beberapa komponen Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi Daerah yang belum memenuhi target , tercapai sebesar 93,11%,yaitu Retribusi Jasa Umum realisasi sebesar 93,34%, Retribusi Jasa Usaha realisasi sebesar 93,07% dan Retribusi Perizinan tertentu realisasi sebesar 90,77%

Secara umum upaya Bapenda Kabupaten Pemalang dalam peningkatan pajak daerah pada tahun 2020 menunjukkan kinerja yang baik mengalami peningkatan dari target yang telah ditentukan, Rasio pajak daerah terhadap PAD persentase capaian kinerjanya sebesar 25,87%, persentase wajib pajak tertagih/persentase/data pajak daerah yang ditetapkan (PBB) menunjukkan peningkatan sebesar 68,33% dan persentase pajak daerah terhadap target mengalami peningkatan melebihi dari target yang telah ditetapkan sebesar 112,66%. Upaya optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah sudah berjalan cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan tercapainya target Pendapatan Asli Daerah yaitu dari target Rp.292.672.718,00,- dan terealisasi Rp.311.455.681.803,00,- atau 106,42% yang berhasil melampaui target.

Dalam melaksanakan upaya untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah ini dipengaruhi oleh beberapa hal yang menjadi pendukung maupun penghambat. Faktor-faktor pendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah antara lain :

- 1) Kerjasama yang baik antar bidang maupun instansi;
- 2) Intensifikasi dan ekstensifikasi potensi pajak dan retribusi.
- 3) Reward bagi wajib pajak dan petugas pemungut pajak;

- 4) Adanya stimulan berupa pembebasan sanksi administrasi/denda pembayaran pajak yang terhutang mulai tanggal 1 Agustus sampai dengan 31 Desember 2020;

Sedangkan faktor-faktor penghambat optimalisasi PAD antara lain:

- 1) Adanya wabah pandemi covid 19 kondisi ini menyebabkan melemahnya perekonomian masyarakat, menurunkan kemampuan dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
- 2) Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak daerah dan retribusi yang masih rendah.

Meskipun sudah mampu mencapai target, namun dalam pelaksanaannya masih mengalami kendala yang dihadapi Badan Pengelolaan Pendapatan Kabupaten Pemalang dalam pencapaian sasaran Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta efisien dalam pemanfaatan APBD antara lain :

- 1) Kinerja pelayanan pajak yang belum memadai dibandingkan dengan tuntutan masyarakat yaitu masih terbatasnya tempat pelayanan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah;
- 2) Masih kurang validnya database wajib pajak yang harus disimpan dalam aplikasi e-SIMPATDA dan e-PBB (Sismiop) dan jaringan sering mengalami gangguan sehingga menghambat dalam proses pemungutan pajak
- 2) Data base PBB P2 belum secara keseluruhan termutakhirkan sejak pelimpahan kewenangan dari pusat kepada Kabupaten/kota tahun 2013 dan perkembangan dinamika obyek pajak selain PBB P2 belum sesuai dengan data pajak yang ada;
- 3) Belum efektifnya regulasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD):
- 4) Belum optimalnya pengelolaan sistem informasi daerah;
- 5) Masih belum optimalnya pengawasan pemungutan pajakdaerah dan retribus daerahi;
- 6) Tingkat kesadaran wajib pajak daerah dan retribusi daerahbelum semuanya membayar sesuai dengan ketentuan;

Analisa lebih mendalam dilakukan terutama terhadap capaian kinerja yang dibawah target untuk mengidentifikasi faktor penyebab sebagai bahan penetapan strategi peningkatan kinerja (*performance improvement*) untuk tahun berikutnya. Oleh karena itu kinerja BAPENDA Kabupaten Pemalang sangat dipengaruhi oleh kinerja bidang-bidang terkait.

Untuk menyelesaikan kendala-kendala yang dialami tentang Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang akan melaksanakan upaya-upaya dalam mencapai keberhasilan anata lain :

- 1) Adanya kebijakan dihapusnya denda pajak sampai tanggal 31 Desember 2020 dan dalam pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah dengan menerapkan protokol kesehatan dengan pengecekan suhu badan dan 3 M (memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak)

- 2) Memperbanyak tempat-tempat pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah untuk mempermudah pelayanan pembayaran pajak selain melalui Bank Jateng juga sudah dapat melalui Alfamart dan Indomart yang tersebar sampai ke pelosok wilayah Pemalang;
- 3) Pengadaan software untuk pengembangan aplikasi;
- 4) Pemutakhiran data wajib pajak dan data obyek pajak secara bertahap, yaitu pemutakhiran data PBB P2, pemutakhiran ZNT, rekonsiliasi data PBB P2, penilaian individu untuk obyek pajak umum yang bernilai tinggi maupun obyek khusus;
- 5) Penyusunan/revisi Peraturan Daerah/ Peraturan Bupati tentang pajak daerah dan Retribusi Daerah;
- 6) Sistem informasi Manajemen (SIM)/aplikasi pajak daerah dan retribusi daerah selalu dievaluasi dan mengoptimalkan sosialisasi aplikasi/sistem kepada pengguna dan peningkatan koordinasi lintas sektoral;
- 7) Meningkatkan pengawasan dan pembinaan kepada petugas pemungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan kerjasama dengan instansi lain (Kejaksaan, Satpol PP) dalam penegakan peraturan pajak daerah;
- 8) Sosialisasi peraturan pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat dan penyebarluaskan informasi pajak daerah berupa papan informasi, banner, dan leaflet.

Anggaran Belanja Langsung tahun 2020 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang yang dikelola untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.14
Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis
Bapenda Kabupaten Pemalang Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Anggaran (RP)	(%)	Program	Keterangan
1.	Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta efisien dalam pemanfaatan APBD	1.195.019.960,00	34,69%	Didukung oleh 5 program 1. Program pelayanan administrasi perkantoran 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatus 3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 4. Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD	Sekretariat
		2.250.195.040,00	65,31%	Didukung oleh 1 program 1. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Bidang-bidang

Sumber : APBD Tahun 2020

Untuk mencapai target kinerja sasaran , didukung dengan 5 program dengan efisiensi penggunaan anggaran sebagai berikut:

- 1) Program pelayanan administrasi perkantoran, dengan anggaran Rp.1801.887.960,00, realisasi Rp.787.731.034,00 atau realisasi anggaran sebesar 98,23 % sisa anggaran Rp. 14.156.926,00, efisiensi anggaran 1,77%;
- 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dengan anggaran Rp.515.037.500,00, realisasi Rp.508.615.659,00, atau realisasi anggaran sebesar 98,75% sisa anggaran Rp.6.421.841,00, efisiensi anggaran 1,25%;
- 3) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dengan anggaran Rp.25.060.000,00, realisasi Rp.25.060.000,00, atau realisasi anggaran sebesar 100%, sisa anggaran Rp.0,00, efisiensi anggaran 0%;
- 4) Program peningkatan perencanaan dan penganggaran, dengan anggaran Rp.59.340.000,00, realisasi Rp.58.925.800,00 atau realisasi anggaran sebesar 99,30%, sisa anggaran Rp.414.200,00, efisiensi anggaran 0,70%;
- 5) Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, dengan anggaran sebesar Rp.2.043.889.540,00, realisasi Rp.1.917.807.674,00 atau realisasi anggaran sebesar 93,83%, sisa anggaran Rp.126.081.866,00, efisiensi 6,17%;

Total anggaran pada program diatas adalah **Rp.3.445.215.000,00** dengan capaian realisasi **Rp.3.298.149.167,00** dengan prosentase **95,73%** ,sehingga terdapat sisa anggaran **Rp 147.074.833,00**, atau efisiensi sebesar **4,27%**.

Capaian akuntabilitas kinerja pemerintah yaitu nilai evaluasi AKIP yang dilakukan oleh Evaluator Inspektorat Kabupaten Pematang terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bapenda Kabupaten Pematang pada tahun 2019 memperoleh nilai atau skor sebesar 52,04 dengan kategori CC (Cukup) yang diartikan bahwa akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, dengan hasil sebagai berikut :

No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
1.	Perencanaan Kinerja	30 %	16,09
2.	Pengukuran Kinerja	25 %	15,94
3.	Pelaporan Kinerja	15 %	8,38
4.	Evaluasi internal	10 %	2,38

5.	Capaian Kinerja	20 %	9,25
	Jumlah	100,00	52,04

Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggaraan pelayanan publik menjadi acuan bagi pemerintah pusat dan daerah untuk mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan publik sekaligus sebagai alat untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik.

Survey kepuasan masyarakat merupakan salah satu alat ukur untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap suatu layanan. Hasil survey yang dapat berupa kualitatif maupun angka absolut merupakan persepsi masyarakat terhadap layanan dari Bapenda Kabupaten Pemalang. Berdasarkan analisa kepuasan masyarakat Kabupaten Pemalang tahun 2020 yang telah disampaikan, maka berikut ini disimpulkan hasil pengukuran :

1. Rangkuman hasil pengukuran kepuasan masyarakat dan kinerja pelayanan publik di Kabupaten Pemalang :

No	Unsur Layanan	Nilai	Mutu Pelayanan
1.	Syarat	79,25	
2.	Prosedur	79,25	Baik
3	Waktu Pelayanan	79,25	Baik
4	Biaya/tarif	84,00	Baik
5	Produk spesifikasi	79,50	Baik
6	Kopetensi Pelaksana	82,25	Baik
7	Perilaku Pelaksana	86,50	Baik
8	Sarana dan Prasarana	76,00	Baik
9	Penanganan Pengaduan	81,50	Baik
	IKM	80,31	Baik

2. Sesuai dengan indeks yang diperoleh 80,31, maka jika merujuk pada pengkategorisasikan mutu layanan dapat dikatakan bahwa kinerja pelayanan publik di Kabupaten Pemalang masuk pada kategori B (Baik)

3. Unsur-unsur kepuasan masyarakat yang menjadi perhatian pengguna pelayanan agar dapat ditingkatkan adalah :
 - 1) Penanganan pengaduan
 - 2) Sarana dan prasarana
 - 3) Waktu penyelesaian pelayanan
4. Perbandingan indeks kepuasan masyarakat realisasi survey kepuasan masyarakat pada pelayanan publik tahun 2020 mengalami kenaikan skor 0,55 dari skor 79,76 (dilaksanakan oleh Bagian Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Setda Kabupaten Pemalang tahun 2018 menjadi 80,31 tahun 2020

Dalam menyampaikan aspirasi, saran/masukan/kritik terhadap pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan dan roda pemerintahan di Kabupaten Pemalang melalui:

- SMS Center Nomor 0815 696 0020.

B. AKUNTABILITAS ANGGARAN

1. Realisasi anggaran

Dalam upaya untuk mengukur penilaian kinerja capaian keuangan selanjutnya dilakukan pengukuran kinerja keuangan terhadap Belanja Langsung. Mendasari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, pengukuran kinerja keuangan per sasaran strategis dihitung dengan membandingkan pagu dan realisasinya. Dari hasil perhitungan tersebut dapat dianalisa tingkat efisiensi anggaran dari masing-masing capaian sasaran. Berikut ini adalah rekapitulasi capaian kinerja keuangan per sasaran :

Tabel.3.15

Target dan Realisasi Anggaran Per Sasaran Strategis Bapenda Kabupaten Pemalang Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Tahun 2020		% Capaian
		Pagu	Realisasi	
1	Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta efisien dalam pemanfaatan APBD	3.445.215.000,00	3.298.140.167,00	95,73
	Jumlah	3.445.215.000,00	3.298.140.167,00	95,73

Sumber : SIMDA Tahun 2020

Akuntabilitas selain dipandang dari segi kinerja yang dihasilkan oleh instansi pemerintah, juga pengalokasian dan pemanfaatan anggaran tepat sasaran, dilakukan secara transparan dan hasil kerjanya dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan jumlah anggaran yang tersedia.

Pada APBD Tahun Anggaran 2020 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pematang Mendapatkan alokasi belanja langsung sebesar Rp.3.445.215.000,00 dan terserap sebesar Rp.3.298.140.167,00 atau 95,73 % yang teralokasi pada :

- Belanja Pegawai sebesar Rp. 112.785.000,00 terserap Rp.109.065.500,00 atau 96,70 %.
- Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 3.061.430.000,00 terserap Rp. 2.924.724.667,00 atau 95,53 %.
- Belanja Modal sebesar Rp. 271.000.000,00 terserap Rp. 264.350.000,00 atau 97,55 %

Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 5 Program 49 kegiatan yang mengarah sasaran strategis dalam kerangka pelaksanaan pencapaian kinerja Bapenda Kabupaten Pematang.

i. Analisis Efisiensi Sumberdaya

Efisiensi sumberdaya diasumsikan dapat tercapai apabila capaian kinerja telah terpenihi 100 % dan memiliki efisiensi anggaran. Adapun tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel.3.16

**Target Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Terhadap Capaian Sasaran Strategis
Bapenda Kabupaten Pematang Tahun 2020**

No	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	Capaian Kinerja Sasaran (%)	Tahun 2019		Efisiensi	% Capaian
				Pagu	Realisasi		
1	Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta efisien dalam pemanfaatan APBD	2	6,42	3.445.215.000,00	3.298.140.167,00	147.074.833,00	95,73
	Jumlah =	2		3.445.215.000,00	3.298.140.167,00	147.074.833,00	95,73

Sumber : SIMDA Tahun 2020

Berdasarkan tabel tersebut diatas, maka dapat diasumsikan bahwa untuk tahun 2020, dari 2 sasaran telah mencapai efisiensi sumber daya sebesar Rp.147.074.833 atau (4,27%), lebih terincinya penyerapan anggaran untuk per program (5 program) dan 49 kegiatan tahun 2020 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel. 3.17
Penyerapan Anggaran Per Program dan Kegiatan
Bapenda Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020

KODE REKENING PROGRAM/KEGIATAN	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	PAGU	REALISASI	Efisiensi	% Capaian
4.04.4.04.07.01.	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3.445.215.000	3.298.140.167	147.074.833	95,73
4.04.4.04.07.01.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	801.887.960	787.731.034	14.156.926	98,23
4.04.4.04.07.01.1.1	Penyediaan Jasa surat menyurat	15.000.000	15.000.000	0	100,00
4.04.4.04.07.01.1.2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	125.418.000	117.303.169	8.114.831	93,53
4.04.4.04.07.01.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional	18.974.000	18.193.675	780.325	95,89
4.04.4.04.07.01.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	13.510.000	12.301.999	1.208.001	91,06
4.04.4.04.07.01.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	25.000.000	24.999.890	110	100,00
4.04.4.04.07.01.1.9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor	7.500.000	7.500.000	0	100,00
4.04.4.04.07.01.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	40.000.000	40.000.000	0	100,00
4.04.4.04.07.01.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	20.000.000	19.999.950	50	100,00
4.04.4.04.07.01.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	25.000.000	25.000.000	0	100,00
4.04.4.04.07.01.1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	29.500.000	29.416.986	83.014	99,72
4.04.4.04.07.01.1.15	Penyediaan bahan bahan bacaan dan peraturan perundangan – undangan	14.100.000	14.100.000	0	100,00
4.04.4.04.07.01.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	80.000.000	86.000.000	0	100,00
4.04.4.04.07.01.1.18	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan keluar daerah	164.535.960	160.565.365	3.970.595	97,59
4.04.4.04.07.01.1.19	Penyediaan Jasa Keamanan	12.000.000	12.000.000	0	100,00
4.04.4.04.07.01.1.25	Penyediaan jasa administrasi keuangan pengelolaan pendapatan	211.350.000	211.350.000	0	100,00

KODE REKENING PROGRAM/KEGIATAN	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	PAGU	REALISASI	Efisiensi	% Capaian
4.04.4.04.07.01.2	Program Peningkatan Sarana dan Programrasarana Aparatur	515.037.500	508.615.569	6.421.841	98,75
4.04.4.04.07.01.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	25.000.000	25.000.000	0	100,00
4.04.4.04.07.01.2.11	Pengadaan komputer dan perlengkapannya	6.000.000	6.000.000	0	100,00
4.04.4.04.07.01.2.22	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	67.999.500	67.963.500	36.000	99,95
4.04.4.04.07.01.2.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	25.000.000	24.194.939	805.061	96,78
4.04.4.04.07.01.2.24	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	75.000.000	74.966.220	33.780	99,95
4.04.4.04.07.01.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	15.000.000	14.495.000	505.000	96,63
4.04.4.04.07.01.2.30	Pemeliharaan rutin / berkala komputer dan perlengkapannya	85.000.000	85.000.000	0	100,00
4.04.4.04.07.01.2.45	Pemeliharaan rutin/berkala software dan sistem informasi	216.038.000	210.996.000	5.042.000	97,67
4.04.4.04.07.01.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0	0	0	0,00
4.04.4.04.07.01.5.2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	0	0	0	0,00
4.04.4.04.07.01.5.4	Pelatihan teknis pelaksanaan tupoksi SKPD	0	0	0	0,00
4.04.4.04.07.01.6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	25.060.000	25.060.000	0	100,00
4.04.4.04.07.01.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD (TAPKIN)	13.920.000	13.920.000	0	100,00
4.04.4.04.07.01.6.2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	0	0	0	100,00
4.04.4.04.07.01.6.4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	11.140.000	11.140.000	0	100,00
4.04.4.04.07.01.9	Program Peningkatan dan Perencanaan Penganggaran SKPD	59.340.000	58.325.800	414.200	99,30
4.04.4.04.07.01.9.1	Penyusunan data base perencanaan SKPD	5.600.000	5.600.000	0	100,00
4.04.4.04.07.01.9.2	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	53.740.000	53.325.800	414.200	99,23
4.04.4.04.07.01.15	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	2.043.889.540	1.917.807.674	126.081.866	93,85
4.04.4.04.07.01.15.4	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	12.266.000	12.195.500	70.500	99,43
4.04.4.04.07.01.15.5	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi	43.650.000	43.500.715	149.285	99,66
4.04.4.04.07.01.15.13	Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan daerah	65.352.000	63.029.828	2.322.172	96,45
4.04.4.04.07.01.15.19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	65.245.000	64.397.250	847.750	98,70

KODE REKUNING PROGRAM/KEGIATAN	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	PAGU	REALISASI	Efisiensi	% Capaian
4.04.4.04.07.01.15.29	Monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengelolaan pendapatan daerah	412.800.000	334.439.109	78.360.891	81,02
4.04.4.04.07.01.15.33	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah pengelolaan eks bondo desa yang desanya berubah status menjadi kelurahan	38.300.000	37.548.300	751.700	98,04
4.04.4.04.07.01.15.36	Peningkatan efektifitas pengelola keuangan daerah	312.343.000	297.238.757	15.104.743	95,16
4.04.4.04.07.01.15.37	Penyusunan pelaporan semesteran aset/barang PD	2.932.500	2.932.500	0	100,00
4.04.4.04.07.01.15.38	Penyusunan perhitungan potensi pajak dan target pendapatan	139.450.000	139.393.952	56.048	99,96
4.04.4.04.07.01.15.39	Penyusunan laporan pendapatan daerah	11.561.500	11.295.000	266.500	97,69
4.04.4.04.07.01.15.40	Penyusunan pemutakhiran data pajak daerah	10.765.040	10.765.040	0	100,00
4.04.4.04.07.01.15.41	Pendataan wajib pajak	92.400.000	84.162.245	8.237.746	91,08
4.04.4.04.07.01.15.42	Penyusunan rekonsiliasi data pelaksanaan pendapatan daerah	7.739.000	7.264.313	474.687	93,87
4.04.4.04.07.01.15.43	Penelitian/pemeriksaan Obyek Pajak dan Wajib Pajak	35.000.000	33.432.606	1.567.394	95,52
4.04.4.04.07.01.15.44	Penilaian, penetapan dan pencetakan Surat Ketetapan Pajak Daerah	319.550.000	316.259.100	3.290.900	98,97
4.04.4.04.07.01.15.45	Penerbitan dan pendistribusian Surat etetapan Pajak Daerah (SKPD/SPPT/DHKP)	52.450.000	49.168.450	3.281.550	93,74
4.04.4.04.07.01.15.46	Penyusunan daftar tunggakan pajak	8.9250.000	8.869.000	51.000	99,43
4.04.4.04.07.01.15.47	Penerbitan dan penyampaian surat tagihan dan surat teguran	233.390.000	230.869.250	2.520.750	98,92
4.04.4.04.07.01.15.49	Penyelesaian pengaduan dan pelayanan pengajuan keberatan	32.670.000	28.658.000	4.012.000	87,72
4.04.4.04.07.01.15.51	Penyelesaian pengaduan dan pelayanan permohonan pengurangan ketetapan pajak/pembetulan /pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar	35.305.000	31.178.750	4.126.250	88,31
4.04.4.04.07.01.15.52	Pengadaan Papan Himbauan Informasi Pajak Daerah	105.000.000	104.410.000	590.000	99,44
4.04.4.04.07.01.15.53	Legalisasi karcis/ benda berharga	6.800.000	6.800.000	0	100,00

Sumber : SIMDA tahun 2020

Dari tabel 3.17 anggaran 2020, bahwa secara asumsi rata-rata capaian anggaran sebesar 95,73, sedangkan yang kurang dari 85% adalah kegiatan monitoring evaluasi, pelaporan dan pengelolaan pendapatan daerah sebesar 81,02 pada belanja uang insentif petugas pemungut pajak, SPPT yang tidak terbayarkan maka uang insentifnya tidak diberikan kepada petugas pemungut pajak di kelurahan, disebabkan karena lemahnya

monitoring dan evaluasi pemungutan pajak, kurang validnya data pajak. Solusi dalam masalah tersebut adalah

Dibawah ini disampaikan realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran strategis melalui program dan kegiatan pada tahun 2019 sebagaimana tabel dibawah

Tabel.3.18
Penyerapan Anggaran Per Program Per Bidang/Sekretariat
Bapenda Kabupaten Pemalang Tahun 2020

No	Bidang/ Sekretariat	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Sekretariat	4	28	1.195.019.960,00	1.179.068.973,00	98,67
2	Bidang Perencanaan Pendapatan	2	10	1.383.706.000,00	1.280.896.131,00	92,57
3	Bidang Penagihan dan Keberatan	1	5	348.585.000,00	337.123.300,00	96,71
4	Bidang Pendataan dan Penetapan	1	6	517.904.040,00	501.051.763,00	96,75
JUMLAH		8	49	3.445.215,00	3.298.140.167,00	95,73

Sumber : SIMDA Tahun 2020

Apabila dilihat dari tabel 3.18. bahwa dari anggaran yang tersedia untuk masing-masing bidang/sektariat dilingkungan Bapenda terserap cukup tinggi, ini menunjukkan bahwa target anggaran yang direncanakan sudah signifikan dengan realisasi penyerapan anggaran pada kegiatan yang dilaksanakan.

Berkaitan dengan Belanja Langsung yang dikelola Bapenda Kabupaten Pemalang pada T.A.2020. Bahwa belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja yang dikelola Bapenda meliputi Belanja Operasi dan Belanja Modal. Anggaran dan realisasi belanja Bapenda T.A. 2020 dapat dilihat pada tabel.dibawah ini.

- Belanja Pegawai sebesar Rp. 112.785.000,00 terserap Rp. 109.065.500,00 atau 96,70 %.

- Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 3.061.430.000,00 terserap Rp. 2.924.724.667,00 atau 95,53 %.
- Belanja Modal sebesar Rp.271.000.000,00 terserapRp. 264.350.000,00 atau 97,55 %

Tabel. 3.19
Realisasi Belanja Bapenda Kabupaten Pemalang Tahun 2020

Belanja	Tahun Anggaran 2020		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Operasi	10.160.039.000,00	9.575.644.309	94,25
Belanja Modal	271.000.000,00	264.350.000,00	97,55
Jumlah Belanja	10.431.039.000,00	9.839.994.309,00	94,33

Sumber : SIMDA

Dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp.10.431.039.000,00 realisasinya sebesar Rp.9.839.994.309,00 atau 94,33 %.

Belanja Operasi

Belanja Operasi Bapenda Kabupaten Pemalang meliputi Belanja Pegawai dan Belanja Barang / jasa, dengan realisasi pada Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel. 3.20
Jumlah Belanja Operasi Bapenda Kabupaten Pemalang Tahun 2020

Belanja Operasi	Tahun Anggaran 2020		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Pegawai	7.098.609.000,00	6.650.919.642,00	93,69
Belanja Barang/ Jasa	3.061.430.000,00	2.924.724.667,00	95,53
Jumlah Belanja Operasi	10.160.039.000,00	9.575.644.309,00	94,25

Dari anggaran Rp.10.160.039.000,00. Realisasi Belanja Operasional Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.9.575.644.309,00 atau 94,25%.

Belanja Modal

Belanja Modal Bapenda Kabupaten Pemalang meliputi Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal aset tetap lainnya dengan realisasi selama Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

Tabel. 3.21
Jumlah Belanja Modal Bapenda Kabupaten Pemalang Tahun 2020

Belanja Modal	Tahun Anggaran 2020		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Tanah	-	-	0,00
Peralatan dan Mesin	31.000.000,00	31.000.000,00	100,00
Gedung dan bangunan	-	-	0,00
Jalan,Irigasi dan jaringan	-	-	0,00
Aset tetap lainnya	240.000.000,00	233.350.000,00	97,23
Jumlah belanja modal	271.000.000,00	264.350.000,00	97,55

Anggaran modal Bapenda Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.271.000.000,00. Realisasi sebesar Rp.264.350.500,00 atau 97,55 %.

Badan Pengelolaan pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang dalam penggunaan sumber daya listrik dan air dalam tahun 2020 menunjukkan adanya efisiensi penggunaan dan dapat dilihat pada tabel 3.20 dan tabel 3.21

Tabel : 3.22
Realisasi Penggunaan Energi Listrik
Bapenda Kabupaten Pemalang Tahun 2020

No	Bulan	Penggunaan (KWH)	Biaya (Rp)	Penghematan Penggunaan	Penghematan Biaya	Ket
1	Januari		8.011.188	-	-	-
2	Pebruari		6.809.485	-	-	-
3	Maret		6.331.152			-
4	April		7.048.652			-
5	Mei		6.711.177			-
6	Juni		6.315.012			-

7	Juli		6.788.943			-
8	Agustus		6.802.449			-
9	September		6.430.928			-
10	Oktober		7.931.956			--
11	Nopember		8.193.440			-
12	Desember		7.005.596			-
	JUMLAH		84.379.978			

Dalam tabel diatas adanya penghematan penggunaan energi listrik Bapenda Kabupaten Pemalang pada tahun 2020 dengan anggaran Rp.96.000.000,00 ,realisasi pembayaran dari Januari sampai dengan Desember 2020 sebesar Rp.84.379.978,00 adanya penghematan Rp.11.620.022,00 atau 12,10% karena efesiensi penggunaan komputer/laptop dan penggunaan lampu pada siang hari.

Tabel : 3.23
Realisasi Penggunaan Energi Air (PDAM)
Bapenda Kabupaten Pemalang Tahun 2020

No	Bulan	Pemakaian (m3)	Biaya (Rp)	Penghematan penggunaan	Penghematan Biaya
1	Januari		177.100		
2	Pebruari		151.500		
3	Maret		265.300		
4	April		202.200		
5	Mei		204.700		
6	Juni		223.900		
7	Juli		211.800		
8	Agustus		49.500		
9	September		134.200		
10	Oktober		93.400		
11	Nopember		87.200		
12	Desember		99.600		

Dalam tabel diatas adanya penghematan penggunaan energi air (PDAM) Bapenda Kabupaten Pemalang pada tahun 2020 dengan anggaran Rp.2.600.000,00 realisasi pembayaran dari Januari sampai dengan Desember 2020 sebesar Rp. 1.900.400,00 adanya penghematan Rp.699.600,00 atau 26,91%

C. INOVASI

Inovasi yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang dalam meningkatkan kinerjanya yaitu :

- 1 Adanya kebijakan dihapusnya denda pajak sampai tanggal 31 Desember 2020;
2. Dalam rangka peningkatan pendapatan daerah dilakukan dengan pengadaan dan pengembangan beberapa aplikasi yaitu :
 - b. Pengadaan software integrasi dengan BPN terkait dengan BPHTB.
 - c. Pengadaan software host to host dengan DPMPSTSP terkait dengan pajak reklame.
 - d. Pengadaan software aplikasi e-KIR terkait dengan retribusi yang ada di Dinas Perhubungan.
 - e. Pengadaan software Pengembangan aplikasi SISMIOP.
 - f. Pengadaan software aplikasi SPOP online.
- 3 Penyusunan Peraturan Daerah;
 - a. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 63 Tahun 2020, tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Pemalang.
 - b. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 64 Tahun 2020, tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan di Kabupaten Pemalang.
 - c. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 65 Tahun 2020, tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Pemalang.
 - d. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 66 Tahun 2020, tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Pemalang.
- 4 Memperbanyak tempat-tempat pembayaran pajak untuk mempermudah pelayanan pembayaran pajak selain melalui Bank Jateng juga sudah dapat melalui Alfamart dan Indomart yang tersebar sampai ke pelosok wilayah Pemalang;
- 5 Bekerja sama dengan Perangkat daerah terkait (Kejaksaaan Negeri dan Kesbang Polinmas) terkait dalam penegakan Peraturan Daerah tentang pajak daerah.
- 6 Bapenda Kabupaten Pemalang dalam pelaksanaan kinerjanya dengan slogan



- LAPAK MURAH : Layanan Pajak Mudah , Sederhana dan Ramah
- SUMEH : Selalu Melayani dengan Hati
- MENTARI : Mendata Setiap Hari
- TTM : Tepat Waktu Tepat Mutu
- NO KORUPSI : Tidak Gratifikasi
- JUDIKA : Jujur Harga Diri Kami

7 Pelaksanaan pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah dengan menerapkan protokol kesehatan dengan pengecekan suhu badan dan 3 M (memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak)





BAB IV

PENUTUP

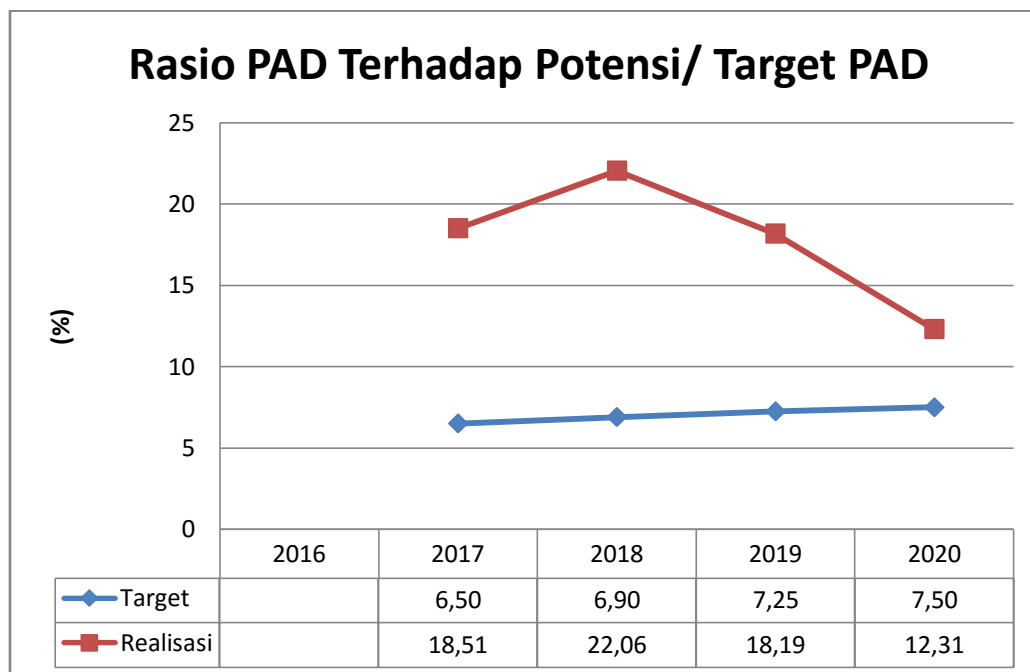
A. Kesimpulan Umum Capaian Kinerja

Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang disusun sebagai wujud dukungan sistem administrasi yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan tugas antar bidang-bidang dan sekretariat Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang, sehingga tercapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebagaimana tercantum dalam Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 dan Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020.

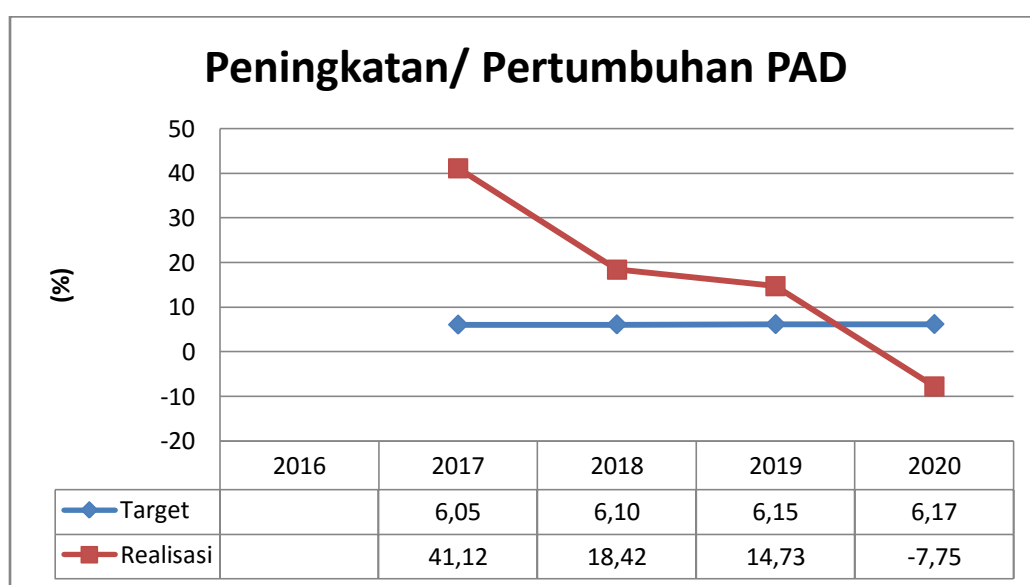
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bapenda Kabupaten Pemalang melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai koordinator untuk merumuskan kebijakan dalam hal Pendapatan Asli Daerah, dan melaksanakan pemungutan pajak daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (Sewa Tanah Eks Bondo Desa).

Hasil laporan kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2020 dapat disimpulkan sebagai berikut :

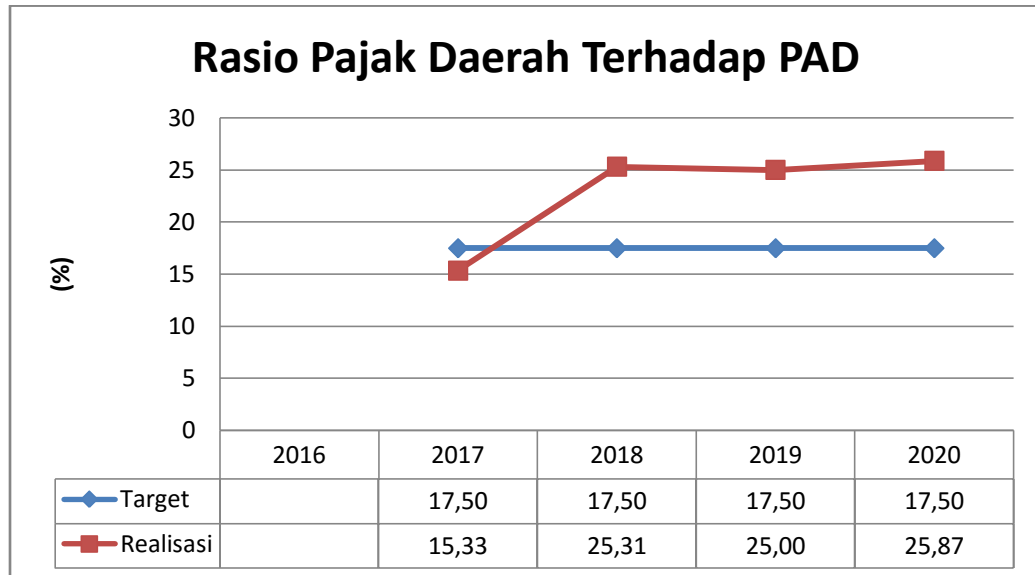
1. Berdasarkan skala peringkat kinerja persentase pencapaian target kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2020 dalam pengelolaan PAD dengan target sebesar Rp.74.242.354.000,00,realisasi sebesar Rp.83.379.207.077,00 (112,31 %) bahwa sasaran strategis telah tercapai 100 % dari target yang telah ditentukan,kenaikannya 12,31% Target kinerja tahun 2020 sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD 2016-2021 dan Renstra 2016-2021 sebagai berikut :
 - a. Target kinerja rasio realisasi PAD terhadap potensi/target PAD sebesar 7,50%,telah terealisasi sebesar 12,31.% ,capaian kinerja 164,13%,mmaka mendapat predikati **SANGAT BAIK** dan perbandingan dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini



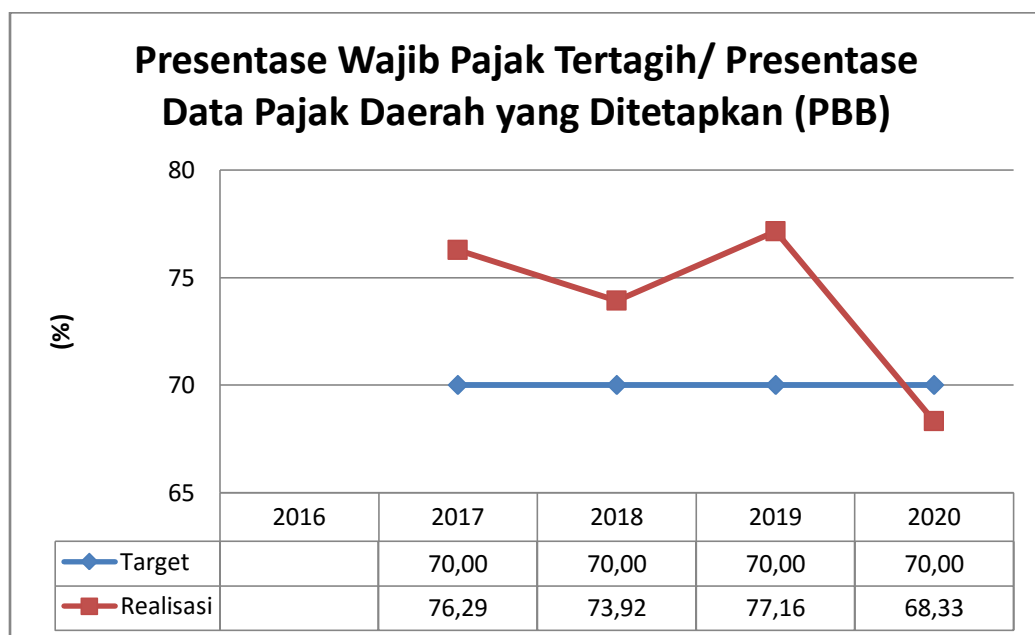
- b. Target Kinerja peningkatan PAD sebesar 6,17%, telah terealisasi sebesar -7,75% capaian kinerjanya -125,61%, maka mendapat predikat **SANGAT RENDAH** dan perbandingan dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



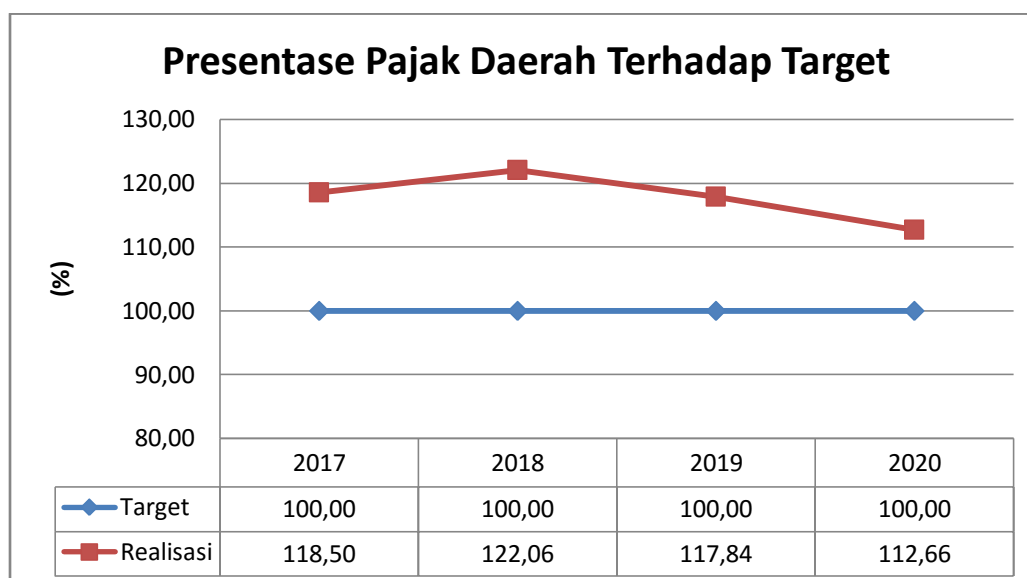
- c. Target Kinerja rasio pajak daerah terhadap PAD sebesar 17,5%, telah terealisasi 25,87%., capaian kinerjanya sebesar 147,83%, maka mendapat predikat **SANGAT BAIK** dan perbandingan dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



- d. Target kinerja persentase wajib pajak tertagih/persentase data pajak daerah yang ditetapkan (PBB) sebesar 70%, telah terealisasi 68,33%, capaian kerjanya sebesar 97,61% , maka mendapat predikatri **SANGAT BAIK** dan perbandingan dengan tahun yang lalu dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



- e. Target kinerja persentase pajak daerah terhadap target sebesar 100%, telah terealisasi sebesar 112,66%, maka mendapat predikat **SANGAT BAIK** dan perbandingan dengan tahun yang lalu dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



Dari data tersebut dapat diketahui bahwa target kinerja asumsi rata-rata adanya peningkatan, hanya ada 2 indikator pada poin a realisasi melebihi target kinerja yaitu Rasio PAD terhadap potensi/target dari target 7,50% terealisasi sebesar 12,31% dan indikator b realisasi mengalami penurunan pada tahun 2020 yaitu pertumbuhan PAD dengan target 6,17% terealisasi sebesar -7,75% . Bapenda sebagai koordinator Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 menunjukkan adanya kinerja yang baik. Hal ini dapat dilihat dari terlampauinya target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 yakni sebesar Rp.311.455.681.803,00 mencapai 106,42% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.292.672.718.000,00. adanya kenaikan realisasi pada pendapatan pajak daerah namun pendapatan retribusi daerah perlu ditingkatkan karena target tidak terealisasi 100%, ada beberapa komponen Retribusi Daerah yang belum memenuhi target (93,11%), antara lain: Retribusi Jasa Umum realisasi sebesar 93,34%, Retribusi Jasa Usaha realisasi sebesar 93,07%, Retribusi Perizinan tertentu realisasi sebesar 90,77% , dibarengi dengan adanya wabah pandemi covid 19 sehingga melemahnya perekonomian masyarakat secara luas.

Secara umum upaya Bapenda dalam peningkatan pajak daerah pada tahun 2020 menunjukkan kinerja yang baik mengalami peningkatan dari target yang telah ditentukan, Rasio pajak daerah terhadap PAD realisasinya sebesar 25,87% dari target 17,50%, capaian kinerjanya 147,83%, persentase wajib pajak tertagih/data pajak daerah yang ditetapkan (PBB) menunjukkan peningkatan sebesar 68,33% dari target 79%, capaian kinerjanya 97,61% dan persentase pajak daerah terhadap target mengalami peningkatan melebihi dari target yang telah ditetapkan sebesar 112,66%. Capaian kinerjanya sebesar 112,66%

2 Akuntabilitas anggaran tercermin dalam program dan kegiatan dan anggaran tahun 2020

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang mendapatkan alokasi belanja langsung sebesar Rp. 3.445.215.000,00 dan terserap untuk operasional sebesar Rp3.298.140.167,00 atau 95,73%. Terdapat efisiensi anggaran Rp. 147.074.833 atau 4,27%. Dari seluruh kegiatan telah dilaksanakan dengan efektif, efisien dan telah mencapai sasaran dan target.

B. Rencana Tindak Lanjut

Adapun langkah – langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak lanjut sebagai berikut :

1. Memperbanyak tempat-tempat pelayanan pajak untuk mempermudah pelayanan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah;
2. Pembinaan dan sosialisasi peraturan pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat dan petugas pemungut pajak daerah dan retribusi daerah baik di desa/kelurahan maupun di kecamatan dan OPD pemungut retribusi;
3. Launcing aplikasi SPOP online dalam upaya mempermudah pelayanan masyarakat dalam pengelolaan pemungutan pajak PBB-P2;
4. Pengembangan aplikasi SIMPATDA;
5. Optimalisasi pengawasan obyek pajak dan retribusi dengan selalu melakukan monitoring dan evaluasi;
6. Pemutahiran data wajib pajak dan data obyek pajak secara bertahap, semua jenis pajak ;
7. Penataan dan penegakan regulasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bekerjasama dengan Kejaksaan dan Satpol PP.

Pemalang, 19 Januari 2021

KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG



BEJO SUWARNO, S.IP
Pembina Utama Muda
NIP. 19611125 198607 1 001

